



**LAPORAN KINERJA
(LKj)
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**



NOMOR: LAP.700/125/ITPROV-1.1/III/2022

TANGGAL : 08 FEBRUARI 2022

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI



Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana disebutkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Gubernur setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi bersama ini menyampaikan pelaporan kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021. Pada prinsipnya laporan ini disampaikan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Jambi, Februari 2022

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690818 199703 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2021 telah berpedoman kepada Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah telah menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: /Kep.Gub/Bappeda-2/2016. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Inspektur pembantu dan kelompok Jabatan fungsional, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki fungsi, antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP capaian kinerja Tercapai dengan realisasi capaian sebesar 100%, dan indikator Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/ dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi dengan realisasi capaian sebesar 64,31%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 98%.
2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan indikator kinerja Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B" dimana pada tahun 2019 realisasi capaian sebesar 23,25%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 86%, serta pada tahun 2021 meningkat menjadi 93%, telah mencapai dari target dari yang diinginkan sebesar 70%. Dan indikator Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai "B" dimana pada tahun 2019 realisasi sebesar 73%, dan tahun 2020 realisasi sebesar 73%, dan tahun 2021 meningkat menjadi 81,82%telah mencapai dari target yang diinginkan sebesar 45%.

3. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi dengan indikator kinerja Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Minimal “ Sangat Tinggi “ sebesar 82%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 64%.
4. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional dengan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut BPK yang Selesai, Belum Tercapai. Persentase tindak lanjut selesai : BPK sebesar 62,89% dengan capaian kinerja sebesar 68,35%, Itjen Kemendagri sebesar 84,06% dengan capaian kinerja sebesar 84,06% dan Inspektorat Provinsi sebesar 46,21% dengan capaian kinerja sebesar 48,14%.
5. Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat Tercapai, dimana pada tahun 2019 realisasi capaian sebesar 86%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 131%, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 164%.
6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan, Tercapai dimana untuk Tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 79,92 lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 82,08, Nilai AKIP tahun 2021 sebesar 80,51 lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 80,12, dan Laporan Keuangan sesuai SAP tahun 2021 sebesar 100 sama dengan tahun 2020 sebesar 100.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi kedepan, sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti, dan temuan-temuan yang mempunyai nilai saldo serta kasus-kasus penyimpangan.
2. Menumbuhkan komitmen yang tinggi bagi penanggungjawab satker/proyek dan pihak lain yang secara langsung mempunyai kaitan dengan hasil pemeriksaan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan tindak lanjut.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP baik dari internal maupun eksternal.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Struktur Organisasi	9
1.2 Tugas dan Fungsi	20
1.3 Isu-Isu Strategis	22
1.4 Keadaan Pegawai	23
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	26
1.6 Keuangan	25
1.7 Sistematis LkjiP	28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	30
2.1 Rencana Strategik.....	30
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	30
2.1.2 Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	33
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	34
2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan	36
2.1.5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	38
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	39
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	44
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	63
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini.....	87
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan	88
3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	96
3.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	98
3.7 Realisasi Anggaran.....	99
BAB IV PENUTUP	101
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2021 & 2022	
Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Lampiran 3 Matriks Renstra 2016-2021	
Lampiran 4 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021	
Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima	

Daftar Tabel

Tabel 1.4.1	Tabel Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.....	24
Tabel 1.5.1	Tabel Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.....	27
Tabel 2.1.3	Tabel Tujuan dan Sasaran Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.....	35
Tabel 2.1.4	Tabel Strategi Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	37
Tabel 2.1.5	Tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	38
Tabel 2.2.1	Tabel Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	39
Tabel 2.2.2	Tabel Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2021	41
Tabel 2.3	Tabel Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2021	42
Tabel 2.3.1	Tabel Anggaran Belanja Langsung per sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	43
Tabel 3.1.1	Tabel Perbandingan antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2021 ...	44
Tabel 3.1.2	Tabel Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	46
Tabel 3.1.3	Tabel Rekapitulasi Temuan BPK RI atas LKPD Pemerintahan Provinsi Jambi.....	47
Tabel 3.1.4	Tabel Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja atas Persentase Nilai Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	48
Tabel 3.1.5	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B	50
Tabel 3.1.6	Tabel Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020	50
Tabel 3.1.7	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Kategori hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota	51
Tabel 3.1.8	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Kab/Kota dengan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi"	52
Tabel 3.1.9	Tabel Rekapitulasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2006-2021 (Kondisi Per 31 Desember 2021)	53
Tabel 3.1.10	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	57
Tabel 3.1.11	Tabel Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2019-2021	57
Tabel 3.1.12	Tabel Rekapitulasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	58
Tabel 3.1.13	Tabel Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018-2021	59
Tabel 3.1.14	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi.....	59
Tabel 3.1.15	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat	60
Tabel 3.1.16	Tabel Realisasi indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	61
Tabel 3.1.17	Tabel Perolehan Nilai AKIP Tahun 2021	62



Tabel 3.1.18	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja atas Laporan Keuangan Sesuai SAP	62
Tabel 3.2	Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya	63
Tabel 3.2.1	Tabel Capaian Kinerja atas Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	64
Tabel 3.2.2	Tabel Rekapitulasi Temuan BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi (posisi Per 31 Desember 2020)	65
Tabel 3.2.3	Tabel Capaian Kinerja atas Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD pemprov Jambi	66
Tabel 3.2.4	Tabel Rekapitulasi Temuan BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi (posisi Per 31 Desember 2019)	67
Tabel 3.2.5	Tabel Capaian Kinerja atas Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Pemprov Jambi.....	68
Tabel 3.2.6	Tabel Capaian Kinerja atas Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B.....	68
Tabel 3.2.7	Tabel Capaian Kinerja atas Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B"	69
Tabel 3.2.8	Tabel Nilai EKPPD Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017	70
Tabel 3.2.9	Tabel Capaian Kinerja atas Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi"	71
Tabel 3.2.10	Tabel Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2006-2020 (Kondisi Per 31 Desember 2020)	72
Tabel 3.2.11	Tabel Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2006-2019 (Kondisi Per 31 Desember 2019)	75
Tabel 3.2.12	Tabel Capaian Kinerja atas Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	78
Tabel 3.2.13	Tabel Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri Jambi (Kondisi Per 31 Desember 2019).....	78
Tabel 3.2.14	Tabel Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri (Kondisi Per 31 Desember 2019)	80
Tabel 3.2.15	Tabel Capaian Kinerja atas Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri.....	81
Tabel 3.2.16	Tabel Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi (Kondisi Per 31 Desember 2020).....	81
Tabel 3.2.17	Tabel Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi (Kondisi Per 31 Desember 2019).....	81
Tabel 3.2.18	Tabel Capaian Kinerja atas Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	84
Tabel 3.2.19	Tabel Capaian Kinerja atas Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawas yang bersertifikat	86
Tabel 3.2.20	Tabel Kinerja IKM Tahun 2020.....	86
Tabel 3.2.21	Tabel Capaian Kinerja AKIP Tahun 2020	87
Tabel 3.2.22	Tabel Capaian Kinerja AKIP Tahun 2020	87

BAB 1

Pendahuluan

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Laporan Kinerja Provinsi Jambi disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Gubernur menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi unit-unit Pemerintah Daerah dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundang-undangan dan terbebas dari praktik penyimpangan, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi juga harus membantu untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi *governance* yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

1.1. Struktur Organisasi

Secara hukum, nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi (ITDAPROV) Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROV) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-bagian pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

A. Inspektur;

B. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- Sub bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam rangka menyelenggarakan Administrasi Inspektorat, yang meliputi perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan Inspektur Pembantu..

Sedangkan fungsi Sekretariat adalah;

- 1) Penyelenggaraan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- 2) Penyelenggaraan pengkajian program kerja Sekretariat dan Inspektorat Daerah;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 4) Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum;
- 7) Penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- 9) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan informasi publik;
- 10) Penyelenggaraan pengkajian bahan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi dan mengelolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 12) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengeambilan kebijakan;

- 13) Penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan;
- 14) Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat;
- 15) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Inspektorat Daerah;
- 16) Penginventarisasian dan mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 17) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 18) Penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan.

C. Inspektur Pembantu I memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Irban I yaitu :

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 4) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- 9) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 12) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 13) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

Objek Pemeriksaan Irbanwil I pada tahun 2021 meliputi :

a) OPD Provinsi Jambi

- ✓ Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
- ✓ Dinas Pemuda dan Olah Raga
- ✓ Dinas Energi dan Sumber daya Mineral
- ✓ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- ✓ Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- ✓ Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
- ✓ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- ✓ Badan Penanggulangan Bencana daerah
- ✓ Badan Penghubung Daerah
- ✓ Biro Kesejahteraan Rakyat
- ✓ Biro Pengadaan Barang dan Jasa

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- ✓ Kabupaten Kerinci

- ✓ Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- c)Kelompok Jabatan Fungsional
 - ✓ Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
 - ✓ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

D. Inspektur Pembantu II memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Irban II adalah yaitu :

- 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 11) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 12) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Irban II pada tahun 2021 meliputi :

a) OPD Provinsi Jambi

- ✓ Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- ✓ Dinas Komunikasi dan Informatika
- ✓ Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- ✓ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- ✓ Dinas Kelautan dan Perikanan
- ✓ Sekretariat DPRD
- ✓ Inspektorat Daerah
- ✓ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- ✓ Biro Hukum
- ✓ Biro Umum

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- ✓ Kabupaten Merangin
- ✓ Kabupaten Sarolangun
- ✓ Kota Jambi

c) Kelompok Jabatan Fungsional

- ✓ Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- ✓ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

E. Inspektur Pembantu III memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Irban III adalah yaitu :

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 4) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;

- 12) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 13) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Objek Pemeriksaan Irban III pada tahun 2021 meliputi :

a) OPD Provinsi Jambi

- ✓ Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- ✓ Dinas Perkebunan
- ✓ Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- ✓ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- ✓ Dinas Ketahanan Pangan
- ✓ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- ✓ Dinas Pendidikan
- ✓ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- ✓ Biro Perekonomian
- ✓ Biro Organisasi

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- ✓ Kabupaten Tebo
- ✓ Kabupaten Bungo
- ✓ Kabupaten Muaro Bungo

c) Kelompok Jabatan Fungsional

- ✓ Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- ✓ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

F. Inspektur Pembantu IV memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Irban IV adalah yaitu :

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 4) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 12) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 13) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Objek Pemeriksaan Irban IV pada tahun 2021 meliputi :

a) OPD Provinsi Jambi

- ✓ Dinas Kesehatan
- ✓ Dinas Kehutanan
- ✓ Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- ✓ Dinas Perhubungan
- ✓ Dinas Lingkungan Hidup
- ✓ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- ✓ Badan Kepegawaian Daerah
- ✓ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- ✓ Biro Administrasi Pembangunan
- ✓ Biro Administrasi Pimpinan

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- ✓ Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- ✓ Kabupaten Batanghari
- ✓ Kabupaten Kota Sungai Penuh

c) Kelompok Jabatan Fungsional

- ✓ Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- ✓ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

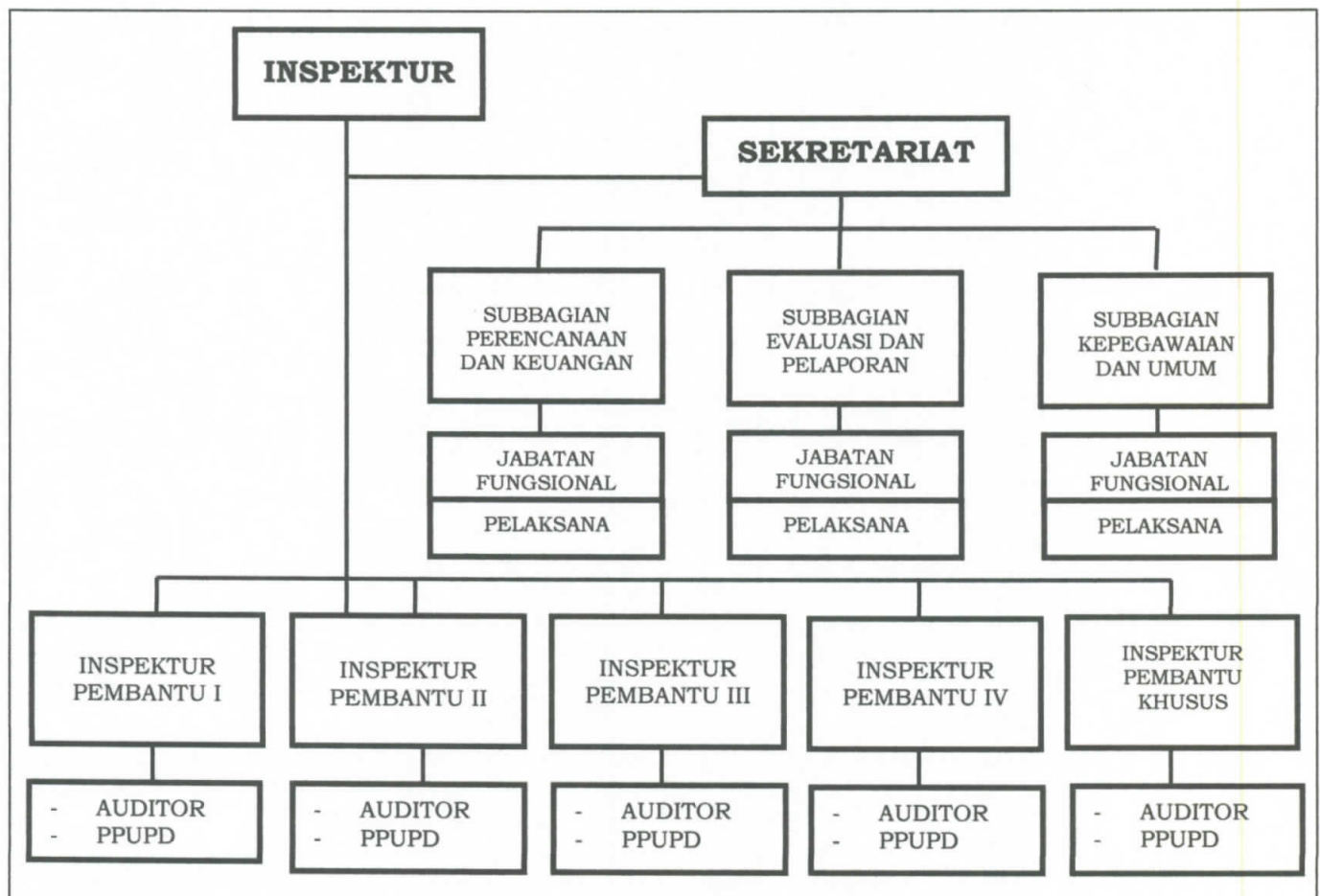
G. Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Irban Khusus adalah yaitu :

- 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
- 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
- 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;

- 5) Penyelenggaraan fasilitasi pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus;
- 7) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus;
- 8) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
- 9) Penyelenggaraan pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 11) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 12) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Kelompok Jabatan Fungsional pada Irban Khusus :

- ✓ Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- ✓ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI****1.2. Tugas dan Fungsi**

Dalam mengemban tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tentunya tidak terlepas dari lembaga-lembaga Teknis Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Sembilan Pemerintah Kabupaten dan dua Pemerintah Kota. Beban tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam tahun 2021 adalah dalam bidang pengawasan umum yang dilakukan secara berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain di daerah seperti Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Itjen Terkait, Inspektorat Kabupaten/Kota, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan dan UPP Saber Pungli Provinsi Jambi, Polda Jambi & Kejati Jambi.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi Pasal 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, maka tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Inspektur Pembantu dan kelompok Jabatan fungsional. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Inspektorat Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok :

**MEMBANTU GUBERNUR DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH
PERANGKAT DAERAH**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui penetapan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi Sesuai dengan substansi diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pengawasan yaitu:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis.

Dimana kebijakan tersebut merupakan suatu perwujudan pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Jambi yang salah satunya adalah :

MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif yang berorientasi pada Pelayanan Publik

1.3. Isu-Isu Strategis

Lingkungan yang dihadapi APIP sangat dinamis, perubahan fundamental dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dorongan bagi perubahan sistem pengawasan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah

menegaskan sikap dan langkah yang harus dilakukan segenap jajaran aparat pemerintah.

Peran Inspektorat sebagai pengawas fungsional terhadap semua kebijakan pemerintah meliputi :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di segala bidang manajemen pemerintahan;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan. Peran ini sangat penting untuk mengawasi dan menjaga agar kebijakan yang telah diambil tidak menimbulkan distorsi/ penyimpangan.
3. Pengawasan terhadap pedoman-pedoman standar pelayanan masyarakat.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan itu sendiri sebagai isu strategis yang harus menjadi perhatian, antara lain :

1. Masih belum maksimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada setiap SKPD sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan didalam pengelolaan anggaran.
2. Masih belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh SKPD, padahal penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan di dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan Sumber daya aparatur.

1.4. Keadaan Pegawai

Pada Inspektorat Provinsi Jambi saat ini, terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) Pegawai, yang terdiri dari : 27 (dua puluh tujuh) orang kualifikasi S2, 57 (lima puluh tujuh) orang dengan kualifikasi S.1, 2 (dua) orang dengan Kualifikasi D.3, 9 (sepuluh) orang dengan kualifikasi SLTA, 1 (satu) orang dengan kualifikasi SLTP (Administrasi Umum), sedangkan untuk kualifikasi Sekolah Dasar (SD) tidak ada. Selain Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya tersebut mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya baik dilapangan maupun di kantor telah dilengkapi dengan Sisdur dan Kode Etik Pengawasan sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas pengawasan. Berikut ini merupakan Tabel serta Diagram Keadaan SDM Inspektorat Provinsi Jambi :

Tabel 1.4.1
Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Jabatan	Wilayah							Jumlah
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Inspektur			1					1
Sekretaris		1						1
Irbn (eselon III)		3	2					5
Auditor Ahli Utama								0
Auditor Ahli Madya		3	11					14
Auditor Ahli Muda		2	8					10
Auditor Ahli Pertama			1					1
Auditor Penyelia					0			0
Auditor Pelaksana Lanjutan				1				1
Auditor Pelaksana								0
P2UPD Ahli Utama								0
P2UPD Ahli Madya		5	8					13
P2UPD Ahli Muda		7	10					17
P2UPD Ahli Pertama		3	5					8
Kepala Sub Bagian		3						3
Fungsional Umum			12	1	10	1		24
Jumlah	0	27	57	2	10	1	0	98

Diagram Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat pada Wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

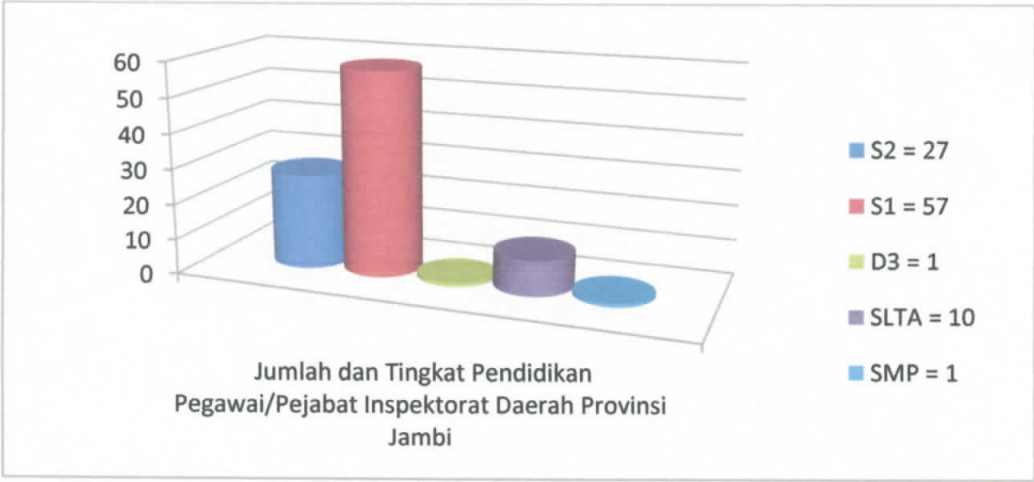
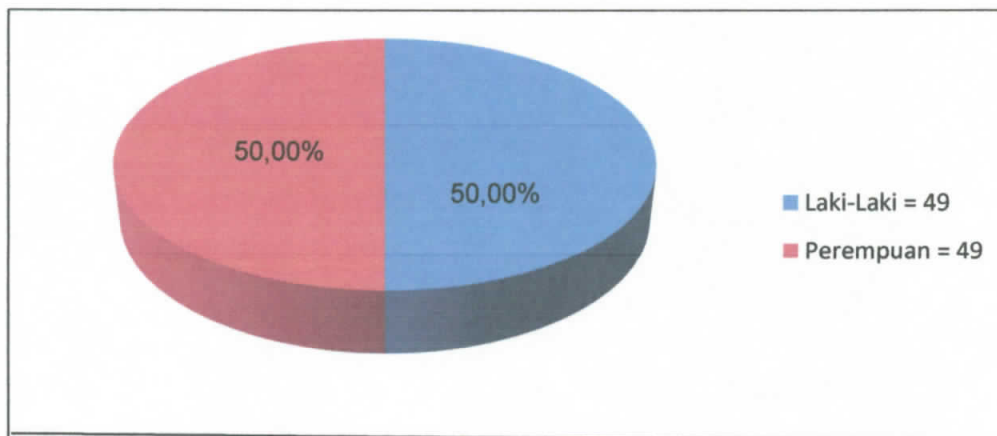
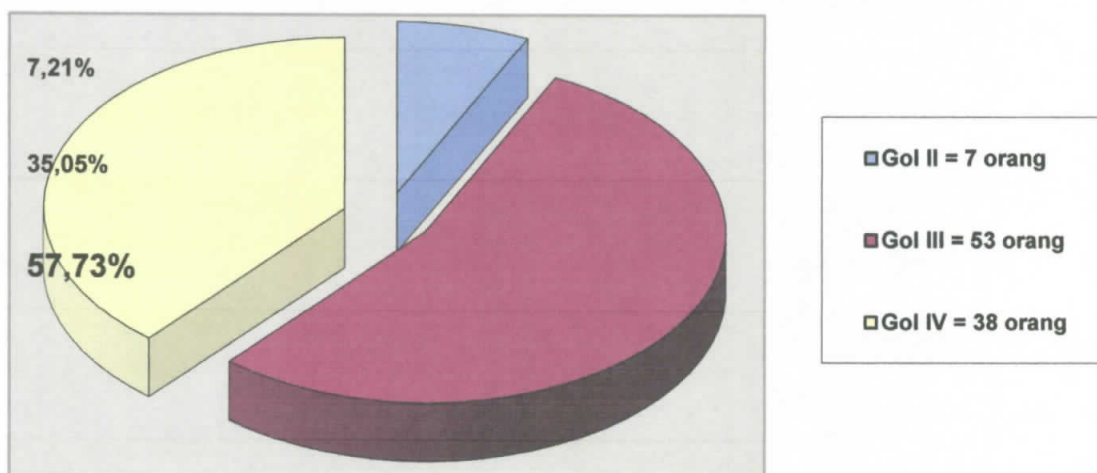


Diagram Keadaan Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin



Keadaan Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pergolongan



Keadaan Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Per Jenis Jabatan

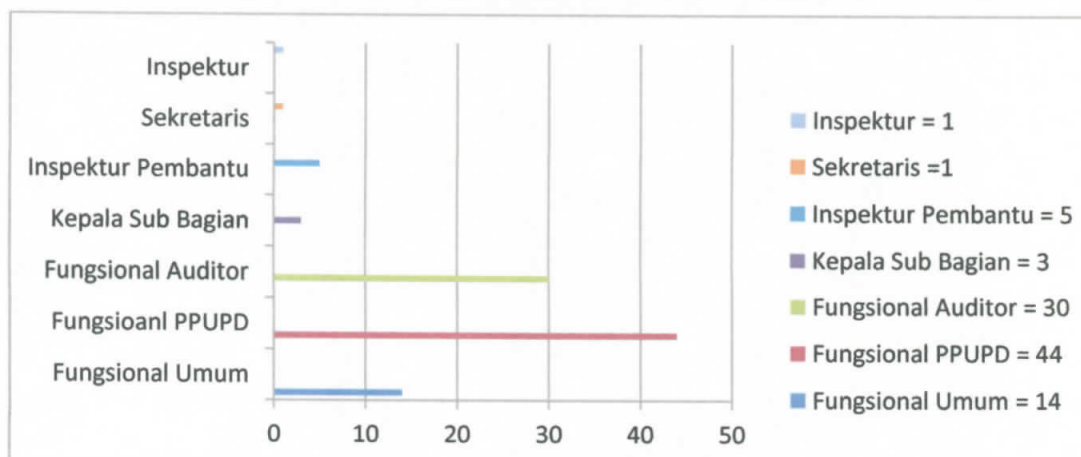


Diagram Keadaan Pegawai/Pejabat pada Inspektorat Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Per Jenjang Jabatan Auditor

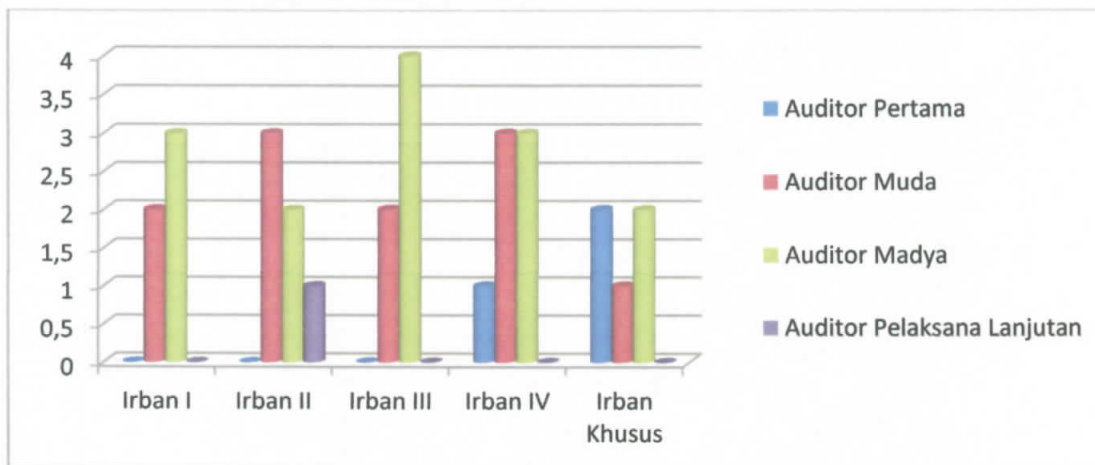
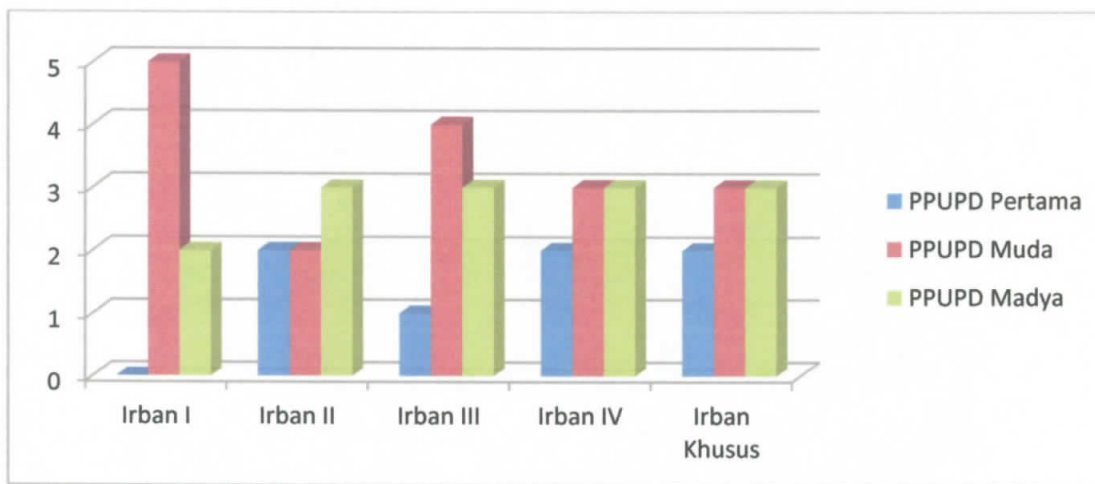


Diagram Keadaan Pegawai/Pejabat pada Inspektorat Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Per Jenjang Jabatan PPUPD



1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah memiliki gedung/kantor sendiri dan telah dilengkapi dengan peralatan dan sarana penunjang dalam bekerja di kantor. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana pada kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5.1
Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat angkutan	22	Baik
2	Alat-alat bengkel dan alat ukur	15	Baik
3	Alat kantor dan rumah tangga	1.225	Baik
4	Alat studio dan alat komunikasi	54	Baik
5	Alat-alat kedokteran	4	Baik
6	Bangunan gedung	9	Baik
7	Jaringan	1	Baik
8	Buku perpustakaan	251	Baik

Sumber data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2021 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni program/kegiatan tahun 2021 sebesar Rp36.227.791.781,- dikarenakan adanya pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19) sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19), Pemerintah Daerah diminta untuk mengambil langkah-langkah dalam menghadapi ancaman yang membahayakan stabilitas perekonomian termasuk salah satunya yaitu

pemotongan anggaran yang secara otomatis berdampak pada struktur anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sehingga dalam APBD Perubahan lokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp29.174.283.754,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp14.686.888.811,- dan belanja langsung sebesar Rp14.487.394.943,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut;
2. Disebutkan pula evaluasi atas pencapaian kinerja dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas

keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1. RENCANA STRATEGIK

Rencana Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periodesebelumnya (2010-2015). RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :

**“Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman,
Tangguh, Adil dan Sejahtera (Tuntas 2021). “**

- Tertib** : Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.
- Unggul** : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman** : Mengartikan keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar suku, agama, dan ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh** : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap goncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Adil** : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang

- baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
 3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
 4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
 5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.
 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Berangkat dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Misi Pemerintah Daerah yaitu :**"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat"**.

2.1.2 Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Dengan pengertian lain bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan maksud Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merumuskan visi organisasi yaitu:

“Mewujudkan Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mengawal Terwujudnya Jambi Tuntas 2021”

Dengan rumusan visi tersebut, diharapkan dapat menjadikan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai pengawal yang tangguh untuk mewujudkan Jambi Tuntas guna mencapai Visi Provinsi Jambi.

Penjelasan Makna

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna dan bebas KKN menjadi bagian dari perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan pentingnya tugas-tugas pengawasan maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan visi yang menitikberatkan pada Profesionalisme dan Integritas dalam pelaksanaan tugas.

B. Misi

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (*Stake Holders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh diwaktu-waktu mendatang. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merumuskan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;

- 2) Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terciptanya aparatur yang bersih, transparan, dan akuntabel;
- 3) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan;
- 4) Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi.

Dengan misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi khususnya yang berkaitan dengan kegiatan baik pengawasan, pembinaan maupun pemeriksaan akan tercipta suatu program secara terpadu bersinergi untuk mencapai kegiatan yang efektif dan efisien, dengan didukung oleh terciptanya aparatur pengawasan yang bersih.

Penjelasan Misi

Maksud dari misi adalah bahwa kegiatan tugas-tugas pengawasan diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud dengan baik.

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, APIP perlu diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan secara continue (*Continuing Professional Education*) guna menciptakan APIP yang profesional. Kualitas hasil pengawasan harus ditingkatkan guna mempertahankan standar kerja dan meningkatkan mutu pelaksanaan kinerja.

Kinerja pengawasan harus lebih ditingkatkan dilingkungan pemerintah melalui sinergi pengawasan berupa kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan berkelanjutan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi dengan maksud agar dalam pelaksanaan menjadi lebih terarah. Tujuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam rangka merealisasikan misi adalah sebagai berikut :

- ✓ Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

- ✓ Tersedianya Aparatur Pengawasan yang Profesional serta Tertatanya Kelembagaan Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurance*) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian penting dalam perencanaan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Sasaran yang ditetapkan atau ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- ✓ Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- ✓ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- ✓ Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi.
- ✓ Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.
- ✓ Meningkatnya kualitas Aparatur Pengawasan yang Profesional, Kompeten dan Berintegritas.

Table 2.1.3
Tujuan dan Sasaran Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	85%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/ dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil	75%	82%	88%	92%	98%	98%
		Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	71%	73%	76%	78%	80%	80%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	61%	63%	65%	67%	70%	70%



	Kab/Kota							
		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	9%	18%	27%	36%	45%	45%
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	27%	36%	45%	55%	64%	64%
	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	Persentase tindakanjuzt BPK yang dapat diselesaikan	83%	85%	87%	90%	92%	92%
		Persentase rekomendasi ltjend yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi ltprov yang dapat diselesaikan	88%	90%	92%	94%	96%	96%
Tersedianya aparatur pengawasan yang profesional serta tertatanya kelembagaan inspektorat sebagai penjamin mutu (Quality assurance) penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	44%	70%	80%	86%	90%	100%

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merumuskan

strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Table 2.1.4
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VISI : Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (Tuntas 2021).				
MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik				
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Melakukan Pembinaan Pengawasan terhadap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Peningkatan intensitas pengawasan SKPD di Lingkup Provinsi Jambi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Melakukan Assistensi dan Pendampingan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Mendorong SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	Melaksanakan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	Memfasilitasi SKPD dalam Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional secara berkala	Mendorong SKPD agar segera menyelesaikan rekomendasi TLHP Aparat Pengawasan Fungsional
2.	Tersedianya aparatur pengawasan yang profesional serta tertatanya kelembagaan inspektorat sebagai penjamin mutu (Quality assurance) penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dan Diklat Non Teknis Lainnya.	Peningkatan Sumber Daya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang lebih berkualitas

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

2.1.5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis organisasi, sebagai berikut :

Table2.1.5
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No	Sasaran	IKU	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1. Persentase laporan keuangan SKPD sesuai SAP 2. Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	Obrik/SKPD/Kabupaten/Kota/Ikhtisar LHP
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B" 2. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai "B"	LHE LKj
3.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1. Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal " Sangat Tinggi".	LPPD

4.	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.	1. Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan 2. Persentase tindaklanjut Itjend Kemendagri yang dapat diselesaikan. 3. Persentase tindaklanjut Itprov yang dapat diselesaikan.	Ikhtisar LHP
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	DUK

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi sebagai bentuk komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Untuk tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki Perjanjian Kinerja, yang salah satu wujudnya adalah adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang merupakan pedoman utama dalam melaksanakan kebijakan pengawasan dan juga tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Perjanjian kinerja tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada Rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016–2021. Didalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan beberapa indikator sasaran yang berperan sebagai media untuk menetapkan rencana tingkat capaian.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1 Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%
		2 Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil	98%



II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.	1	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	70%
		2	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	45%
III	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	64%
IV	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1	Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan	92%
		2	Persentase rekomendasi Itjend Kemendagri yang dapat diselesaikan	100%
		3	Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan	96%
V	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	86%
VI	Meningkatnya Kuailtas Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,92
		2	Nilai AKIP	62
		3	Laporan Keuangan sesuai SAP	100

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Sasaran Pertama, berupa Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Untuk sasaran yang pertama kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Sasaran Kedua, berupa Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dan Kabupaten/Kota, Untuk sasaran yang kedua kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Sasaran Ketiga, berupa Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya persentase

kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah minimal “Sangat Tinggi”. Untuk sasaran yang ketiga kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Sasaran Keempat, berupa Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional. Kondisi ini ditandai dengan persentase penyelesaian tindak lanjut BPK, Itjend, Inspektorat Provinsi yang selesai. Untuk sasaran yang keempat kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Sasaran Kelima, berupa Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kondisi ini ditandai dengan adanya peningkatan persentase jumlah pemeriksa serta APIP yang telah mengikuti diklat sertifikasi JFA dan P2UPD maupun diklat yang terkait dengan bidang pengawasan. Untuk sasaran yang kelima kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi berupa kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sasaran Keenam, berupa Meningkatnya Kuailtas Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan. Kondisi ini ditandai dengan adanya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai AKIP, Laporan Keuangan sesuai SAP. Untuk sasaran yang kelima kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Adapun perencanaan pembinaan dan pengawasan pada Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi selama 6 tahun dari tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2021

No.	OBRIK	TAHUN						JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	SKPD	45	43	43	43	43	43	258
2.	KASUS	21	34	34	16	16	16	137
3.	KAB/KOTA	11	11	11	11	11	11	11
JUMLAH		77	88	88	70	70	70	461

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021

Untuk melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran murni program/kegiatan tahun 2021 sebesar Rp36.227.791.781,- kemudian dilakukan rasionalisasi anggaran

dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga pada APBD Perubahan alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp29.174.283.754,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	243.098.580	251.399.212
		Administrasi keuangan perangkat daerah	15.506.911.838	14.280.328.811
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	3.499.984.632	1.695.978.860
		Administrasi umum perangkat daerah	1.890.963.883	1.884.082.289
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2.459.501.369	1.745.482.289
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	864.206.194	761.126.194
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.136.612.800	1.051.732.745
2	Program Penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal	7.631.723.465	4.960.610.202
		Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	1.107.321.372	822.622.572
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asisten	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	574.355.120	276.691.760
		Pendampingan dan asistensi	2.420.433.900	1.444.228.820

Sumber Data : DPA Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp29.174.283.754,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp14.686.888.811,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.756.403.053,-



Belanja Modal sebesar Rp1.730.991.890,-. Alokasi untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No	Sasaran	Anggaran	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	7.227.461.594	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi	- Penyelenggaraan pengawasan internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu - Pendampingan dan asistensi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.	5.783.232.774	Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Penyelenggaraan pengawasan internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
3	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	5.783.232.774	Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Penyelenggaraan pengawasan internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
4	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	4.960.610.202	Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Penyelenggaraan pengawasan internal
5	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	4.960.610.202	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sumber Data Inspektorat Daerah Provinsi Jambi 2021

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Tabel 3.1.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (5/4X100%)
1	2	3		4	5	6
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	100%	100%
		2	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	98%	64,31%	65,61%

II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.	1	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	70%	93%	132%
		2	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	45%	81,82%	181,82%
III	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	64%	82%	128%
IV	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1	Persentase tindak lanjut BPK yang dapat diselesaikan	92%	62,89%	68,35%
		2	Persentase rekomendasi Itjend yang dapat diselesaikan	100%	84,06%	84,06%
		3	Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan	96%	46,21%	48,14%
V	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	86%	164%	190%
VI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,92	83,47	104,44%
		2	Nilai AKIP	62	80,51	129,85%
		3	Laporan Keuangan sesuai SAP	100	100	100%

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

Sasaran I : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD di LIngkungan Pemerintah Provinsi Jambi digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi, dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP

Pengukuran atas indikator kinerja **Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP** dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah laporan keuangan SKPD yang telah sesuai dengan SAP terhadap jumlah seluruh SKPD dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP} = (\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang telah sesuai SAP} : \text{Jumlah Seluruh SKPD}) \times 100\%$$

Maka,

$$\text{Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP} = (43 : 43) \times 100\% = 100\%$$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} : (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} : (100\% : 100\%) \times 100\% = 100\%$$

Sampai dengan Laporan LKj Inspektorat ini diterbitkan laporan keuangan SKPD belum ada.

Tabel 3.1.2
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Persentase laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	100%	100%

2. Indikator Kinerja : Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi

Pengukuran atas indikator kinerja **Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi** dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah nilai temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi yang telah dikembalikan ke Kas Daerah terhadap Jumlah



nilai temuan keuangan sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi = (jumlah nilai temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi yang telah dikembalikan ke Kas Daerah: Jumlah nilai temuan keuangan sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi) x 100%

Tabel 3.1.3
Rekapitulasi Temuan BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi
(per 31 Desember 2021)

No	Judul	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian		
						Selesai	Dalam Proses	Belum TL
1	LKPD TA 2003	14	100.494.467.546,74	14	74.746.087.333,74	74.746.087.333,74	-	-
2	LKPD TA 2004	13	8.229.463.197,56	20	3.921.100.767,12	3.921.100.767,12	-	-
3	LKPD TA 2005	22	15.218.842.652,35	50	9.710.173.394,78	9.710.173.394,78	-	-
4	LKPD TA 2006	17	5.905.660.067,74	52	1.342.003.080,00	1.342.003.080,00	-	-
5	LKPD TA 2007	28	13.800.870.476,87	72	12.594.432.773,53	12.196.621.569,53	397.811.204,00	-
6	LKPD TA 2008	14	3.196.138.897,88	44	2.792.103.273,33	2.792.103.273,33	-	-
7	LKPD TA 2009	28	737.691.407,12	64	797.691.407,12	795.191.407,12	2.500.000,00	-
8	LKPD TA 2010	21	497.915.206.105,86	56	3.678.718.344,38	654.586.344,38	3.024.132.000,00	-
9	LKPD TA 2011	21	26.782.847.839,46	41	24.518.386.995,37	5.023.174.447,54	19.495.212.547,83	-
10	LKPD TA 2012	27	4.767.500.123,97	82	231.058.391,00	92.916.791,00	138.141.600,00	-
11	LKPD TA 2013	19	7.874.517.184,64	42	3.124.788.495,00	3.074.718.745,00	38.669.750,00	11.400.000,00
12	LKPD TA 2014	19	27.360.549.940,01	46	25.823.284.415,98	3.684.255.792,56	22.117.248.623,42	-
13	LKPD TA 2015	17	10.517.234.918,92	50	10.267.234.918,92	678.784.310,31	9.588.450.608,61	-
14	LKPD TA 2016	17	3.069.014.079,99	44	2.408.246.926,00	716.399.590,00	1.691.847.336,00	-
15	LKPD TA 2017	14	8.210.928.567,99	43	8.210.928.567,99	6.120.794.784,95	2.090.133.783,04	-
16	LKPD TA 2018	26	14.424.291.649,08	70	14.424.291.649,08	3.546.661.348,83	10.877.630.300,25	-
17	LKPD TA 2019	11	5.720.430.414,31	28	5.720.430.414,31	4.920.071.551,11	800.358.863,20	-
18	LKPD TA 2020	41	5.652.356.121,28	98	5.652.356.121,28	995.531.827,78	4.656.824.293,50	-
JUMLAH		369	759.878.011.191,77	916	209.963.317.268,93	135.011.176.359,08	74.918.960.909,85	11.400.000,00

Sumber Data : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti /dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi

dari target 98%, tercapai sebesar 65,61%. Atau terealisasi sebesar Rp135.011.176.359,08 dari Rp209.963.317.268,93, Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut :

Maka,

Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi = $(Rp135.011.176.359,08 : Rp209.963.317.268,93) \times 100\% = 64,30\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : $(Realisasi\ Kinerja : Target\ Kinerja) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(64,30\% : 98\%) \times 100\% = 65,61\%$

Tabel 3.1.4
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan
ke Kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Pemprov Jambi

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Persentase nilai temuan keuangan yang telah ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	98%	64,31%	65,61%

Sasaran II : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B dan Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai B, dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B

Pengukuran atas indikator kinerja Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah SAKIP SKPD yang memperoleh hasil evaluasi dengan nilai B terhadap jumlah seluruh SKPD dikalikan 100%. Hasil Evaluasi SAKIP SKPD diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, hal tersebut dikarenakan atas proses penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dilakukan sebelum proses evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B = (jumlah SAKIP SKPD yang memperoleh hasil evaluasi dengan nilai B : Jumlah Seluruh SKPD) x 100%

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja OPD yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terhadap 43 (empat puluh tiga) OPD Pemerintah Provinsi Jambi, diperoleh hasil sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| a. OPD yang memperoleh hasil Evaluasi A (memuaskan) | : 3 |
| b. OPD yang memperoleh hasil Evaluasi BB (sangat baik) | : 11 |
| c. OPD yang memperoleh hasil Evaluasi B (baik) | : 26 |
| d. OPD yang memperoleh hasil Evaluasi CC (cukup) | : <u>3</u> |
| | 43 |

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 40 OPD yang memperoleh hasil evaluasi sama dengan dan lebih dari B.

Maka,

Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B = (40 : 43) x 100% = 93,02%

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(93,02\% : 70\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 132%

Tabel 3.1.5
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B	70%	93,02%	132%

2. Indikator Kinerja : Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai “B”

Pengukuran atas indikator kinerja **Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai “B”** dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah kabupaten/Kota yang memperoleh nilai B terhadap Jumlah seluruh Kabupaten/Kota dikalikan 100%. Hasil Evaluasi SAKIP yang digunakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN RB tahun 2020, dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses evaluasi SAKIP. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota =
 $(\text{Jumlah Kab/Kota yang memperoleh nilai B} : \text{Jumlah seluruh Kab/Kota}) \times 100\%$

Tabel 3.1.6
Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
1	Kab. Muaro Jambi	60,63	B
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	56,57	CC
3	Kab. Tanjung Jabung Timur	57,82	CC
4	Kab. Batang Hari	70,26	BB

5	Kab. Sarolangun	62,82	B
6	Kab. Tebo	63,70	B
7	Kab. Bungo	67,60	B
8	Kab. Merangin	68,19	B
9	Kab. Kerinci	63,77	B
10	Kota Jambi	66,01	B
11	Kota Sungai Penuh	66,12	B

Maka,

Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota = $(9 : 11) \times 100\% = 81,82\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(45\% : 81,82\%) \times 100\% = 181,82\%$

Tabel 3.1.7
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Persentase kategori hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota	45%	81,82%	181,82%

Sasaran III : MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH KAB/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya kinerja pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi digunakan indikator kinerja yaitu : Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”, dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja : Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”.

Pengukuran atas indikator kinerja Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi” dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah kab/kota yang memperoleh

predikat hasil EKPPD “Sangat Tinggi” terhadap jumlah seluruh Kab/Kota di Provinsi Jambi dikalikan 100%. Hasil penilaian EKPPD diperoleh berdasarkan Laporan Hasil penilaian EKPPD Kab/Kota Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, hal tersebut dikarenakan atas proses evaluasi EKPPD Kab/Kota Tahun 2021 belum dilaksanakan dan hasil evaluasi EKPPD Tahun 2019 dan 2020 s.d saat ini belum keluar hasil penilaiannya. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi” = (jumlah kab/kota yang memperoleh predikat hasil EKPPD “Sangat Tinggi” : jumlah seluruh Kab/Kota di Provinsi Jambi) x 100%

Berdasarkan Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2018 diperoleh informasi bahwa terdapat 9 (sembilan) Kab/Kota yang memperoleh hasil evaluasi sama dengan dan lebih dari B.

Maka,

Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi” = $(9 : 11) \times 100\% = 82\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(82\% : 64\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja: 128%

Tabel 3.1.8
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Persentase Kab/Kota dengan Hasil Penilaian EKPPD minimal Sangat Tinggi	64%	82%	128%

**Sasaran IV : MENINGKATNYA PENYELESAIAN TLHP APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL**

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Persentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri dan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi, dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pengukuran atas indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah hasil pemeriksaan BPK dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK} = \left(\frac{\text{jumlah hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{jumlah hasil pemeriksaan BPK}} \right) \times 100\%$$

Tabel 3.1.9
Rekapitulasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2006-2021 (Kondisi Per 31 Desember 2021)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
1	2	3	4	5	6	7	8
	TAHUN 2006	45	89	86	3	0	0
1	Pemeriksaan LKPD TA 2005	22	50	49	1	0	0
2	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi	8	9	9	0	0	0
3	General Audit BPD Jambi Tahun Buku 2005	15	30	28	2	0	0
	TAHUN 2007	57	139	136	3	0	0
4	Pemeriksaan LKPD TA 2006	17	52	51	1	0	0
5	Pemeriksaan Bantuan Parpol TA 2006	3	6	6	0	0	0
6	Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi TA 2007	3	3	3	0	0	0
7	Pemeriksaan atas Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007	4	11	11	0	0	0
8	Pemeriksaan Operasional BPD Jambi Tahun Buku 2006 dan 2007	14	30	30	0	0	0
9	Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi TA 2007	16	37	35	2	0	0



	TAHUN 2008	88	224	219	5	0	0
10	Pemeriksaan LKPD TA 2007	28	72	70	2	0	0
11	Pemeriksaan Pendapatan TA 2008	13	27	27	0	0	0
12	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Raden Mattaher TA 2007	19	70	68	2	0	0
13	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I)	16	26	26	0	0	0
14	Pemeriksaan Portofolio dan Operasional Keuangan Bank Jambi TA 2008	12	29	28	1	0	0
	TAHUN 2009	43	101	99	2	0	0
15	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi TA 2008	14	44	43	1	0	0
16	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2009	7	28	27	1	0	0
17	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009	22	29	29	0	0	0
	TAHUN 2010	55	126	110	16	0	0
18	Pemeriksaan LKPD TA 2009	28	64	62	2	0	0
19	Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi	3	5	5	0	0	0
20	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2010	3	7	6	1	0	0
21	Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manunggal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel & Resort	3	5	3	2	0	0
22	Pemeriksaan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010 pada KPU, Panwaslu dan Instansi Terkait Lainnya se-Provinsi Jambi	8	16	6	10	0	0
23	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Farmasi, Pemeliharaan Peralatan, dan Rekam Medik dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Paripurna Terpadu Bermutu pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	10	29	28	1	0	0
	TAHUN 2011	47	113	88	25	0	0
24	Pemeriksaan LKPD 2010	21	56	45	11	0	0
25	Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2010	4	7	6	1	0	0
26	Pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011	8	24	21	3	0	0
27	Pemeriksaan Atas Operasional Bank Tahun 2010 dan 2011 (s.d. 30 Juni 2011) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	8	17	15	2	0	0
28	Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi	6	9	1	8	0	0



	Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi						
	TAHUN 2012	40	81	58	23	0	0
29	Pemeriksaan LKPD 2011	21	41	29	12	0	0
30	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	4	11	9	2	0	0
31	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesmasda pada Kementerian Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jambi	15	29	20	9	0	0
	TAHUN 2013	76	214	147	26	41	0
32	Pemeriksaan LKPD TA 2012	27	82	60	18	4	0
33	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Manajemen RSUD Raden Mattaher TA 2013	19	49	41	7	1	0
34	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Jambi	8	18	14	1	3	0
35	Pemeriksaan atas Operasional PT BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III)	10	21	21	0	0	0
36	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan dan Reviu LK oleh APIP TA 2012 dan Sem I TA 2013	12	44	11	0	33	0
	TAHUN 2014	25	54	35	13	6	0
37	Pemeriksaan LKPD TA 2013	19	42	25	11	6	0
38	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	10	2	0	0
	TAHUN 2015	53	108	34	43	31	0
39	Pemeriksaan LKPD TA 2014	19	46	14	21	11	0
40	Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015	8	20	7	6	7	0
41	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III 2015)	6	10	0	0	10	0
42	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi	10	20	13	6	1	0
43	Efisiensi Dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	10	12	0	10	2	0
	TAHUN 2016	52	137	36	42	59	0
44	Pemeriksaan LKPD TA 2015	17	50	29	15	6	0
45	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang Pada Provinsi Jambi TA 2016	8	27	5	16	6	0
46	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Pada Provinsi Jambi TA	7	14	2	11	1	0



	2016						
47	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 Sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi	9	24	0	0	24	0
48	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Jambi	11	22	0	0	22	0
	TAHUN 2017	23	56	31	18	7	0
49	Pemeriksaan LKPD TA 2016	17	44	23	16	5	0
50	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	8	2	2	0
	TAHUN 2018	19	55	18	32	5	0
51	Pemeriksaan LKPD TA 2017	14	43	15	28	0	0
52	PDDT Belanja Daerah Provinsi Jambi TA 2018	5	12	3	4	5	0
	TAHUN 2019	41	110	9	60	41	0
53	Pemeriksaan LKPD TA 2018	26	71	2	28	41	0
54	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 – 2018	12	30	3	27	0	0
55	PDDT Belanja Modal Infrastruktur 2019	3	9	4	5	0	0
	TAHUN 2020	37	104	23	81	0	0
56	Pemeriksaan LKPD TA 2019	11	28	5	23	0	0
57	Pemeriksaan Kinerja Efektifitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Intansi Terkait Lainnya (bulan Desember 2020)	9	24	1	23	0	0
58	Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi(bulan Desember 2020)	17	52	17	35	0	0
	TAHUN 2021	49	123	30	93	0	0
59	Pemeriksaan LKPD TA 2020	42	98	21	77	0	0
60	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Samsat TA 2020	7	25	9	16	0	0
	TOTAL	750	1834	1159	485	190	0

Sumber Data : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK s.d Desember 2021, adalah sebagai berikut :



Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK = $(1159: 1843) \times 100\% = 62,89\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(62,89\% : 92\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja: 68,35%

Tabel 3.1.10
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	92%	62,89%	68,35%

2. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kepmendagri

Pengukuran atas indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepmendagri dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah hasil pemeriksaan Itjen Kepmendagri yang telah ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah hasil pemeriksaan Kepmendagri dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kepmendagri = $(\text{jumlah hasil pemeriksaan Kepmendagri yang telah ditindaklanjuti} : \text{jumlah hasil pemeriksaan Kepmendagri}) \times 100\%$

Tabel 3.1.11
Rekapitulasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TLHP			
				S	BS	BD	TPTD
1	2019	22	36	36	0	0	0
2	2021	14	33	22	11	0	0
TOTAL		36	69	58	11	0	0

Sumber Data : Inspektorat Jenderal Kemendagri RI

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri s.d Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen
Kepmendagri = $(58: 69) \times 100\% = 84,06\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja : $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(84,06\% : 100\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 84,06%

Tabel 3.1.12
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAAN KINERJA TAHUN 2021
2	3	4	5
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	100%	84,06%	84,06%

3. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi

Pengukuran atas indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Provinsi = $(\text{jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah ditindaklanjuti} : \text{jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi}) \times 100\%$

Tabel 3.1.13
Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Selesai	Dalam Proses	Blm Di TL
1	2018	77	120	93	0	27
2	2019	71	112	48	0	64
3	2020	192	323	105	1	217
4	2021	96	211	108	0	103
TOTAL		436	766	354	1	411

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi = $(354 : 766) \times 100\% = 46,21\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(46,21\% : 96\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 48,14%

Tabel 3.1.14
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	96%	46,21%	48,14%

Sasaran V : MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas digunakan indikator kinerja yaitu : Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat, dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat

Pengukuran atas indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2021
Adapun jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2021 adalah sebanyak 74 orang
- 2) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2020
Adapun jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2020 adalah sebanyak 59 orang
- 3) Hitung persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2021, dengan formula :

Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2021 = $((\text{Jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2021} - \text{jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2020}) : \text{Jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2020}) \times 100\%$

Maka,

Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2021 = $((74 - 59) : 59) \times 100\%$
= 25,42%

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(164\% : 86\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 190%

Tabel 3.1.15
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Persentase Jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	86%	164%	190%

Sasaran VI : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai AKIP dan Laporan Keuangan sesuai SAP, dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara Skala Likert Adapun formulasi dalam menghitung realisasi skor IKM adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}}$$

Tabel 3.1.16
Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Skor IKM	79,92	83,47	104,44%

2. Indikator Kinerja : Nilai AKIP

Pengukuran atas indikator kinerja nilai AKIP menggunakan data hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi atas LKj tahun 2020, dikarenakan proses evaluasi atas LKj Tahun 2021 baru dilakukan setelah selesainya proses penyusunan LKj. Adapun realisasi kinerja atas kinerja : jumlah nilai AKIP yaitu sebagai berikut :

Table 3.1.17
Perolehan Nilai AKIP Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Jumlah Nilai Akip	62	80,51	129,85%

3. Indikator Kinerja : Laporan Keuangan sesuai SAP

Pengukuran atas indikator kinerja Laporan Keuangan SAP dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah laporan keuangan Provinsi yang telah sesuai dengan SAP terhadap laporan keuangan provinsi yang terbit dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Laporan Keuangan Provinsi sesuai SAP = (Jumlah Laporan Keuangan Provinsi yang telah sesuai SAP : Jumlah Laporan Keuangan) x 100%

Maka,

Laporan Keuangan Provinsi sesuai SAP = (1 : 1) x 100%
=100%

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : (Realisasi Kinerja : Target Kinerja) x 100%
Capaian Kinerja : (100% : 100%) x 100% = 100%

Tabel 3.1.18
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Laporan Keuangan Sesuai SAP

Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	2	3	4
Laporan Keuangan sesuai SAP	100	100	100%



3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2021 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2019
1	2	3		4	5	5	5
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	64,31%	65,61%	60,28%	60,28%
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.	1	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	93%	132%	125%	34,7%
		2	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	81,82%	181,82%	202%	202%
III	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	82%	128%	128%	98%
IV	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1	Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan	62,89%	68,35%	83%	77,86%
		2	Persentase rekomendasi Itjend yang dapat diselesaikan	84,06%	84,06%	91%	96%
		3	Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan	46,21%	48,14%	32,51%	64,64%
V	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	164%	190%	152%	100%



VI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,47%	104,44%	102%	102%
		2	Nilai AKIP	80,51%	129,85%	129%	129%
		3	Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	100%

Adapun analisis atas capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Sasaran I : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

1. Indikator Kinerja : Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP

Untuk Menghitung capaian kinerja **Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP** dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja atas
Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP

Indikator Kinerja	2020			2019		
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2019

2. Indikator Kinerja : Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi

Capaian Kinerja Tahun 2020, dihitung berdasarkan perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Adapun realisasi kinerja atas **Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil**



pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi s.d Tahun 2020
yaitu :

Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi s.d Tahun 2020 = (jumlah nilai temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi yang telah dikembalikan ke Kas Daerah s.d Tahun 2020 : Jumlah nilai temuan keuangan sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi) x 100%

Tabel 3.2.2
Rekapitulasi Temuan BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi
(Posisi Per 31 Desember 2020)

No	Judul	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian		
						Selesai	Dalam Proses	Belum TL
1	LKPD TA 2003	14	100.494.467.546,74	14	74.746.087.333,74	74.746.087.333,74	0	0
2	LKPD TA 2004	13	8.229.463.197,56	20	3.921.100.767,12	3.921.100.767,12	0	0
3	LKPD TA 2005	22	15.218.842.652,35	50	9.710.173.394,78	9.710.173.394,78	0	0
4	LKPD TA 2006	17	5.905.660.067,74	52	1.342.003.080,00	1.342.003.080,00	0	0
5	LKPD TA 2007	28	13.800.870.476,87	72	12.594.432.773,53	12.196.621.569,53	397.811.204,00	0
6	LKPD TA 2008	14	3.196.138.897,88	44	2.792.103.273,33	2.792.103.273,33	0	0
7	LKPD TA 2009	28	737.691.407,12	64	797.691.407,12	795.191.407,12	2.500.000,00	0
8	LKPD TA 2010	21	497.915.206.105,86	56	3.678.718.344,38	654.586.344,38	3.024.132.000,00	0
9	LKPD TA 2011	21	26.782.847.839,46	41	24.518.386.995,37	5.023.174.447,54	19.495.212.547,83	0
10	LKPD TA 2012	27	4.767.500.123,97	82	231.058.391,00	92.916.791,00	138.141.600,00	0
11	LKPD TA 2013	19	7.874.517.184,64	42	3.124.788.495,00	3.074.718.745,00	38.669.750,00	11.400.000,00
12	LKPD TA 2014	19	27.360.549.940,01	46	25.823.284.415,98	3.684.255.792,56	22.117.248.623,42	0
13	LKPD TA 2015	17	10.517.234.918,92	50	10.267.234.918,92	678.784.310,31	9.588.450.608,61	0
14	LKPD TA 2016	17	3.069.014.079,99	44	2.408.246.926,00	716.399.590,00	1.691.847.336,00	0
15	LKPD TA 2017	14	8.210.928.567,99	43	8.210.928.567,99	6.120.794.784,95	2.090.133.783,04	0
16	LKPD TA 2018	26	14.424.291.649,08	70	14.424.291.649,08	2.030.423.557,27	11.226.094.464,54	1.167.773.627,27
17	LKPD TA 2017	11	5.720.430.414,31	28	5.720.430.414,31	176.140.747,20	5.544.289.667,11	0,00
JUMLAH		328	754.225.655.070,49	818	204.310.961.147,65	127.755.475.935,83	75.354.531.584,55	1.179.173.627,27

Maka,

Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi s.d Tahun 2020 = $(Rp127.755.475.935,83 : Rp204.310.961.147,65) \times 100\% = 62,52\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja 2020 : $(\text{Realisasi Kinerja 2020} : \text{Target Kinerja 2020}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(62,52\% : 92\%) \times 100\% = 67,96\%$

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja atas
Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke
Kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Pemprov Jambi

Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
2	3	4	5
Persentase nilai temuan keuangan yang telah ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	92%	62,52%	67,96%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2019

Capaian Kinerja Tahun 2019, dihitung berdasarkan perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Adapun realisasi kinerja atas **Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi** s.d Tahun 2019 yaitu :

Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi s.d Tahun 2019 = $(\text{jumlah nilai temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi yang telah dikembalikan ke Kas Daerah s.d Tahun 2019} : \text{Jumlah nilai temuan keuangan sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi}) \times 100\%$



Tabel 3.2.4
Rekapitulasi Temuan BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi
(Posisi Per 31 Desember 2019)

No	Judul	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian		
						Selesai	Dalam Proses	Belum TL
1	LKPD TA 2003	14	100.494.467.546,74	14	74.746.087.333,74	74.746.087.333,74	-	-
2	LKPD TA 2004	13	8.229.463.197,56	20	3.921.100.767,12	3.921.100.767,12	-	-
3	LKPD TA 2005	22	15.218.842.652,35	50	9.710.173.394,78	9.710.173.394,78	-	-
4	LKPD TA 2006	17	5.905.660.067,74	52	1.342.003.080,00	1.342.003.080,00	-	-
5	LKPD TA 2007	28	13.800.870.476,87	72	12.594.432.773,53	12.196.621.569,53	397.811.204,00	-
6	LKPD TA 2008	14	3.196.138.897,88	44	2.792.103.273,33	2.792.103.273,33	0	-
7	LKPD TA 2009	28	737.691.407,12	64	797.691.407,12	795.191.407,12	2.500.000,00	-
8	LKPD TA 2010	21	497.915.206.105,86	56	3.678.718.344,38	654.586.344,38	3.024.132.000,00	-
9	LKPD TA 2011	21	26.782.847.839,46	41	24.518.386.995,37	5.023.174.447,54	19.495.212.547,83	-
10	LKPD TA 2012	27	4.767.500.123,97	82	231.058.391,00	92.916.791,00	138.141.600,00	-
11	LKPD TA 2013	19	7.874.517.184,64	42	3.124.788.495,00	3.074.718.745,00	38.669.750,00	11.400.000,00
12	LKPD TA 2014	19	27.360.549.940,01	46	25.823.284.415,98	3.684.255.792,56	22.117.248.623,42	-
13	LKPD TA 2015	17	10.517.234.918,92	50	10.267.234.918,92	678.784.310,31	9.588.450.608,61	-
14	LKPD TA 2016	17	3.069.014.079,99	44	2.408.246.926,00	716.399.590,00	1.691.847.336,00	-
15	LKPD TA 2017	14	8.210.928.567,99	43	8.210.928.567,99	6.120.794.784,95	2.030.826.983,04	-
16	LKPD TA 2018	26	14.424.291.649,08	70	14.424.291.649,08	1.321.631.587,47	8.440.839.741,39	4.661.820.320,22
JUMLAH		317	748.505.224.656,18	790	198.590.530.733,34	126.870.543.218,83	66.965.680.394,29	4.673.220.320,22

Maka,

Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi s.d Tahun 2019 = $(Rp126.870.543.218,83 : Rp198.590.530.733,34) \times 100\% = 63,88\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja 2019: $(\text{Realisasi Kinerja 2019} : \text{Target Kinerja 2019}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(63,88\% : 92\%) \times 100\% = 69,43\%$

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja atas
Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas
Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Pemprov Jambi

Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
1	2	3	4
Persentase nilai temuan keuangan yang telah ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	92%	63,88%	69,43%

Sasaran II : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

1. Indikator Kinerja : Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2020 diperoleh melalui hasil evaluasi SAKIP SKPD tahun 2019, dan untuk realisasi kinerja tahun 2019 diperoleh melalui hasil evaluasi SAKIP SKPD tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses evaluasi SAKIP SKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja atas
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B

Indikator Kinerja	2020			2019		
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B	67%	84%	125%	67%	23,25%	34,7%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2019

2. Indikator Kinerja : Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai “B”

Pengukuran atas capaian kinerja **Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai “B”** dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Realisasi Kinerja tahun 2020 dihitung berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh KEMENPAN RB tahun 2019 dan realisasi kinerja tahun 2019 dihitung berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh KEMENPAN RB tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KEMENPAN RB.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja atas
Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota
dengan nilai “B”

Indikator Kinerja	2020			2019		
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan Nilai B	36%	73%	202%	36%	73%	202%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2019

Sasaran III : MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH KAB/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Indikator Kinerja : Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”.

Pengukuran atas capaian kinerja **Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”** dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk menghitung realisasi kinerja tahun 2020 berdasarkan Laporan Hasil Penilaian EKPPD Kab/Kota Tahun 2018 yang dilakukan oleh

KEMENDAGRI dan untuk menghitung realisasi kinerja tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Penilaian EKPPD Kab/Kota Tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses EKPPD yang dilakukan oleh KEMENDAGRI dan Laporan Penilaian EKPPD tahun 2017 baru keluar pada tahun 2019 dan laporan hasil penilaian EKPPD tahun 2018 keluar di tahun 2020.

Nilai EKPPD Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Jambi Tahun 2018 bahwa terdapat 9 (sembilan) Kab/Kota yang memperoleh hasil evaluasi sama dengan dan lebih dari B.

Maka,

Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi” untuk realisasi kinerja tahun 2020 = $(9 : 11) \times 100\% = 82\%$

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja 2020 : $(\text{Realisasi Kinerja 2020} : \text{Target Kinerja 2020}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(82\% : 64\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 128%

Tabel 3.2.8
Nilai EKPPD Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Jambi Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
1	Kab. Muaro Jambi	2,6232	Tinggi (T)
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	2,6488	Tinggi (T)
3	Kab. Tanjung Jabung Timur	2,9046	Tinggi (T)
4	Kab. Batang Hari	2,8711	Tinggi (T)
5	Kab. Sarolangun	3,2889	Sangat Tinggi (ST)
6	Kab. Tebo	3,0223	Sangat Tinggi (ST)
7	Kab. Bungo	3,0452	Sangat Tinggi (ST)
8	Kab. Merangin	3,3921	Sangat Tinggi (ST)
9	Kab. Kerinci	3,1325	Sangat Tinggi (ST)
10	Kota Jambi	3,1325	Sangat Tinggi (ST)
11	Kota Sungai Penuh	2,9841	Tinggi (T)

Nilai EKPPD Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017 bahwa terdapat 6 (enam) Kab/Kota yang memperoleh hasil evaluasi sama dengan dan lebih dari B.

Maka,

Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi” untuk realisasi kinerja tahun 2019 = $(6 : 11) \times 100\% = 54\%$

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja 2019 : $(\text{Realisasi Kinerja 2019} : \text{Target Kinerja 2019}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(54\% : 55\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 98%

Tabel 3.2.9
Capaian Kinerja atas
Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”

Indikator Kinerja	2020			2019		
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Kategori Hasil EKPPD Kab/Kota dengan Nilai Sangat Tinggi	64%	82%	128%	55%	54%	98%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2019

Sasaran IV : MENINGKATNYA PENYELESAIAN TLHP APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL

1. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas realisasi kinerja tahun 2020, adalah sebagai berikut :



Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d Tahun 2020 = (jumlah hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti : jumlah hasil pemeriksaan BPK) x 100%

Tabel 3.2.10
Rekapitulasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
Tahun 2006-2020 (Kondisi Per 31 Desember 2020)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
1	2	3	4	5	6	7	8
	TAHUN 2006	45	89	86	3	0	0
1	Pemeriksaan LKPD TA 2005	22	50	49	1	0	0
2	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi	8	9	9	0	0	0
3	General Audit BPD Jambi Tahun Buku 2005	15	30	28	2	0	0
	TAHUN 2007	57	139	136	3	0	0
4	Pemeriksaan LKPD TA 2006	17	52	51	1	0	0
5	Pemeriksaan Bantuan Parpol TA 2006	3	6	6	0	0	0
6	Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi TA 2007	3	3	3	0	0	0
7	Pemeriksaan atas Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007	4	11	11	0	0	0
8	Pemeriksaan Operasional BPD Jambi Tahun Buku 2006 dan 2007	14	30	30	0	0	0
9	Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi TA 2007	16	37	35	2	0	0
	TAHUN 2008	88	224	219	5	0	0
10	Pemeriksaan LKPD TA 2007	28	72	70	2	0	0
11	Pemeriksaan Pendapatan TA 2008	13	27	27	0	0	0
12	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Raden Mattaher TA 2007	19	70	68	2	0	0
13	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I)	16	26	26	0	0	0
14	Pemeriksaan Portofolio dan Operasional Keuangan Bank Jambi TA 2008	12	29	28	1	0	0
	TAHUN 2009	43	101	99	2	0	0
15	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi TA 2008	14	44	43	1	0	0
16	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2009	7	28	27	1	0	0
17	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009	22	29	29	0	0	0
	TAHUN 2010	55	126	110	16	0	0



18	Pemeriksaan LKPD TA 2009	28	64	62	2	0	0
19	Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi	3	5	5	0	0	0
20	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2010	3	7	6	1	0	0
21	Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manunggal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel & Resort	3	5	3	2	0	0
22	Pemeriksaan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010 pada KPU, Panwaslu dan Instansi Terkait Lainnya se-Provinsi Jambi	8	16	6	10	0	0
23	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Farmasi, Pemeliharaan Peralatan, dan Rekam Medik dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Paripurna Terpadu Bermutu pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	10	29	28	1	0	0
TAHUN 2011		47	113	88	25	0	0
24	Pemeriksaan LKPD 2010	21	56	45	11	0	0
25	Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2010	4	7	6	1	0	0
26	Pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011	8	24	21	3	0	0
27	Pemeriksaan Atas Operasional Bank Tahun 2010 dan 2011 (s.d. 30 Juni 2011) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	8	17	15	2	0	0
28	Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi	6	9	1	8	0	0
TAHUN 2012		40	81	58	23	0	0
29	Pemeriksaan LKPD 2011	21	41	29	12	0	0
30	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	4	11	9	2	0	0
31	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesmasda pada Kementerian Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jambi	15	29	20	9	0	0
TAHUN 2013		76	214	147	26	41	0
32	Pemeriksaan LKPD TA 2012	27	82	60	18	4	0
33	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Manajemen RSUD Raden Mattaher TA 2013	19	49	41	7	1	0
34	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Jambi	8	18	14	1	3	0
35	Pemeriksaan atas Operasional PT BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III)	10	21	21	0	0	0



36	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan dan Reviu LK oleh APIP TA 2012 dan Sem I TA 2013	12	44	11	0	33	0
	TAHUN 2014	25	54	35	13	6	0
37	Pemeriksaan LKPD TA 2013	19	42	25	11	6	0
38	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	10	2	0	0
	TAHUN 2015	53	108	34	43	31	0
39	Pemeriksaan LKPD TA 2014	19	46	14	21	11	0
40	Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015	8	20	7	6	7	0
41	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III 2015)	6	10	0	0	10	0
42	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi	10	20	13	6	1	0
43	Efisiensi Dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	10	12	0	10	2	0
	TAHUN 2016	52	137	36	42	59	0
44	Pemeriksaan LKPD TA 2015	17	50	29	15	6	0
45	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang Pada Provinsi Jambi TA 2016	8	27	5	16	6	0
46	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Pada Provinsi Jambi TA 2016	7	14	2	11	1	0
47	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 Sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi	9	24	0	0	24	0
48	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Jambi	11	22	0	0	22	0
	TAHUN 2017	23	56	31	18	7	0
49	Pemeriksaan LKPD TA 2016	17	44	23	16	5	0
50	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	8	2	2	0
	TAHUN 2018	19	55	18	32	5	0
51	Pemeriksaan LKPD TA 2017	14	43	15	28	0	0
52	PDTT Belanja Daerah Provinsi Jambi TA 2018	5	12	3	4	5	0
	TAHUN 2019	26	71	2	28	41	0
53	Pemeriksaan LKPD TA 2018	26	71	2	28	41	0



54	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 – 2018	12	30	3	27	0	0
55	PDTT Belanja Modal Infrastruktur 2019	3	9	3	6	0	0
	TAHUN 2020	37	104	3	25	76	0
56	Pemeriksaan LKPD TA 2019	11	28	3	25	0	0
57	Pemeriksaan Kinerja Efektifitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Intansi Terkait Lainnya (bulan Desember 2020)	9	24	0	0	24	0
58	Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi(bulan Desember 2020)	17	52	0	0	52	0
	TOTAL	701	1710	1119	338	253	0

Sumber Data : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK s.d Desember 2020, adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK} = (1119 : 1710) \times 100\% = 65,43\%$$

Adapun perhitungan capaian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja 2020: (Realisasi Kinerja 2020 : Target Kinerja 2020) } \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja : (65,43\% : 90\%) } \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja : 72,70\%}$$

Pengukuran atas realisasi kinerja tahun 2019, adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d Tahun 2019} = (\text{jumlah hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti : jumlah hasil pemeriksaan BPK}) \times 100\%$$

Tabel 3.2.11
Rekapitulasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2006-2019 (Kondisi Per 31 Desember 2019)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
1	2	3	4	5	6	7	8
	TAHUN 2006	45	89	86	3	0	0



1	Pemeriksaan LKPD TA 2005	22	50	49	1	0	0
2	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi	8	9	9	0	0	0
3	General Audit BPD Jambi Tahun Buku 2005	15	30	28	2	0	0
	TAHUN 2007	57	139	136	3	0	0
4	Pemeriksaan LKPD TA 2006	17	52	51	1	0	0
5	Pemeriksaan Bantuan Parpol TA 2006	3	6	6	0	0	0
6	Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi TA 2007	3	3	3	0	0	0
7	Pemeriksaan atas Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007	4	11	11	0	0	0
8	Pemeriksaan Operasional BPD Jambi Tahun Buku 2006 dan 2007	14	30	30	0	0	0
9	Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi TA 2007	16	37	35	2	0	0
	TAHUN 2008	88	224	219	5	0	0
10	Pemeriksaan LKPD TA 2007	28	72	70	2	0	0
11	Pemeriksaan Pendapatan TA 2008	13	27	27	0	0	0
12	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Raden Mattaher TA 2007	19	70	68	2	0	0
13	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I)	16	26	26	0	0	0
14	Pemeriksaan Portofolio dan Operasional Keuangan Bank Jambi TA 2008	12	29	28	1	0	0
	TAHUN 2009	43	101	99	2	0	0
15	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi TA 2008	14	44	43	1	0	0
16	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2009	7	28	27	1	0	0
17	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009	22	29	29	0	0	0
	TAHUN 2010	55	126	110	16	0	0
18	Pemeriksaan LKPD TA 2009	28	64	62	2	0	0
19	Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi	3	5	5	0	0	0
20	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2010	3	7	6	1	0	0
21	Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambi sapta Manunggal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel & Resort	3	5	3	2	0	0
22	Pemeriksaan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010 pada KPU, Panwaslu dan Instansi Terkait Lainnya se-Provinsi Jambi	8	16	6	10	0	0
23	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Farmasi, Pemeliharaan Peralatan, dan Rekam Medik dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Paripurna Terpadu Bermutu pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	10	29	28	1	0	0
	TAHUN 2011	47	113	88	25	0	0
24	Pemeriksaan LKPD 2010	21	56	45	11	0	0
25	Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2010	4	7	6	1	0	0



26	Pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011	8	24	21	3	0	0
27	Pemeriksaan Atas Operasional Bank Tahun 2010 dan 2011 (s.d. 30 Juni 2011) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	8	17	15	2	0	0
28	Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi	6	9	1	8	0	0
TAHUN 2012		40	81	58	23	0	0
29	Pemeriksaan LKPD 2011	21	41	29	12	0	0
30	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	4	11	9	2	0	0
31	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesmasda pada Kementerian Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jambi	15	29	20	9	0	0
TAHUN 2013		76	214	147	26	41	0
32	Pemeriksaan LKPD TA 2012	27	82	60	18	4	0
33	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Manajemen RSUD Raden Mattaher TA 2013	19	49	41	7	1	0
34	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Jambi	8	18	14	1	3	0
35	Pemeriksaan atas Operasional PT BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III)	10	21	21	0	0	0
36	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan dan Reviu LK oleh APIP TA 2012 dan Sem I TA 2013	12	44	11	0	33	0
TAHUN 2014		25	54	35	13	6	0
37	Pemeriksaan LKPD TA 2013	19	42	25	11	6	0
38	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	10	2	0	0
TAHUN 2015		53	108	34	43	31	0
39	Pemeriksaan LKPD TA 2014	19	46	14	21	11	0
40	Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015	8	20	7	6	7	0
41	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III 2015)	6	10	0	0	10	0
42	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi	10	20	13	6	1	0
43	Efisiensi Dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	10	12	0	10	2	0
TAHUN 2016		52	137	36	42	59	0
44	Pemeriksaan LKPD TA 2015	17	50	29	15	6	0
45	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang Pada Provinsi Jambi TA 2016	8	27	5	16	6	0
46	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Pada Provinsi Jambi TA 2016	7	14	2	11	1	0



47	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 Sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi	9	24	0	0	24	0
48	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Jambi	11	22	0	0	22	0
	TAHUN 2017	23	56	31	18	7	0
49	Pemeriksaan LKPD TA 2016	17	44	23	16	5	0
50	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	8	2	2	0
	TAHUN 2018	19	55	18	32	5	0
51	Pemeriksaan LKPD TA 2017	14	43	15	28	0	0
52	PDTT Belanja Daerah Provinsi Jambi TA 2018	5	12	3	4	5	0
	TAHUN 2019	26	71	2	28	41	0
53	Pemeriksaan LKPD TA 2018	26	71	2	28	41	0
	TOTAL	649	1568	1099	279	190	0

Sumber Data : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK s.d Desember 2019, adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK} = (1099 : 1568) \times 100\% = 70,08\%$$

Adapun perhitungan capaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja 2019: (Realisasi Kinerja 2019 : Target Kinerja 2019) x 100\%}$$

$$\text{Capaian Kinerja : (70,08\% : 90\%) x 100\%}$$

$$\text{Capaian Kinerja : 77,86\%}$$

Tabel 3.2.12
Capaian Kinerja atas
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

Indikator Kinerja	2020			2019		
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	90%	65,43%	72,70%	90%	70,08%	77,86%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2019

2. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kepmendagri

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kepmendagri dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas realisasi kinerja tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kepmendagri s.d Tahun 2020 = $(\text{jumlah hasil pemeriksaan Itjen Kepmendagri yang telah ditindaklanjuti} : \text{jumlah hasil pemeriksaan Itjen Kepmendagri}) \times 100\%$

Tabel 3.2.13
Rekapitulasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Itjen Kepmendagri Jambi (Kondisi Per 31 Desember 2019)

No	Tahun	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TLHP			
					S	BS	BD	TPTD
1	2019	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	1	3	3	0	0	
2	2019	Pajak daerah dan retribusi daerah	2	4	4	0	0	
3	2019	Hibah dan Bantuan Sosial	3	8	8	0	0	
4	2019	Pengadaan Barang dan Jasa	7	13	13	0	0	
5	2019	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Lmms	5	6	6	0	0	
6	2019	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	3	3	0	0	
TOTAL			22	37	34	0	0	

Sumber Data : Inspektorat Jenderal Kemendagri RI

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kepmendagri s.d Desember 2020, adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kepmendagri = $(37 : 37) \times 100\% = 100\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja 2020 : $(\text{Realisasi Kinerja 2020} : \text{Target Kinerja 2020}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(100\% : 100\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 100%

Pengukuran atas realisasi kinerja tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kepmendagri s.d Tahun 2019 = (jumlah hasil pemeriksaan Itjen Kepmendagri yang telah ditindaklanjuti : jumlah hasil pemeriksaan Itjen Kepmendagri) x 100%

Tabel 3.2.14
Rekapitulasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri
(Kondisi Per 31 Desember 2019)

No	Tahun	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TLHP			
					S	BS	BD	TPTD
1	2019	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	1	3	3	0	0	
2	2019	Pajak daerah dan retribusi daerah	2	4	4	0	0	
3	2019	Hibah dan Bantuan Sosial	3	8	6	2	0	
4	2019	Pengadaan Barang dan Jasa	7	13	12	1	0	
5	2019	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Lmms	5	6	6	0	0	
6	2019	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	3	3	0	0	
TOTAL			22	37	34	3	0	

Sumber Data : Inspektorat Jenderal Kemendagri RI

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kepmendagri s.d Desember 2019, adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kepmendagri = $(34 : 37) \times 100\% = 91,89\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja 2019: $(\text{Realisasi Kinerja 2019} : \text{Target Kinerja 2019}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(100\% : 91,89\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 91,89%

Tabel 3.2.15
Capaian Kinerja atas
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

Indikator Kinerja	2020			2019		
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	100%	100%	100%	100%	91,89%	91,89%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2019

3. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas realisasi kinerja tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi s.d Tahun 2020 = (jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah ditindaklanjuti : jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi) x 100%

Tabel 3.2.16
Rekapitulasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi
(Kondisi Per 31 Desember 2020)

No.	OPD	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Selesai	Dalam Proses	Blm Di TL
1	Dinas Pendidikan	53	81	0	0	81
2	Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi	9	10	0	0	10
3	Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Peternakan	10	31	28	0	3
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	8	3	0	5
5	Dinas Kesehatan	15	36	24	0	12
6	Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher	8	22	22	0	0
7	BAPELKES Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	6	18	0	0	18

No.	OPD	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Selesai	Dalam Proses	Blm Di TL
8	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi	20	21	0	0	21
9	Dinas Perkebunan	14	19	0	0	19
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	11	26	0	0	26
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	5	0	0	5
12	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	9	13	0	0	13
13	Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	6	6	0	0
14	Sekretariat DPRD	3	3	3	0	0
15	Dinas Sosial dan Dukcapil	10	16	16	0	0
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	3	0	0	3
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	4	5	3	1	1
JUMLAH		192	323	105	1	217

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi s.d Desember 2020, adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi = $(105 : 323) \times 100\% = 32,50\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja 2020 : $(\text{Realisasi Kinerja 2020} : \text{Target Kinerja 2020}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(32,50\% : 94\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 34,57%

Pengukuran atas realisasi kinerja tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi s.d Tahun 2019 = $(\text{jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah ditindaklanjuti} : \text{jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi}) \times 100\%$



Tabel 3.2.17
Rekapitulasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi
(Kondisi Per 31 Desember 2019)

NO	OPD / BIRO	TEMUAN							
		Temuan Keuangan					Temuan Administrasi		
		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai Temuan	Telaah Disetor	Belum Disetor	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Sudah Selesai TL Ditindaklanjuti (BT)
1	Dinas Kesehatan	13	21	Rp 3.860.000,00	Rp 3.860.000,00	Rp -	13	21	21
2	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	7	10	Rp -	Rp -	Rp -	7	10	9
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	8	13	Rp 682.000,00	Rp 682.000,00	Rp -	8	13	13
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	6	9	Rp -	Rp -	Rp -	6	9	5
5	Dinas Perkebunan	8	12	Rp -	Rp -	Rp -	8	12	7
6	RSUD Raden Mattaher	10	13	Rp -	Rp -	Rp -	10	13	12
7	Dinas Kehutanan	8	14	Rp -	Rp -	Rp -	8	14	7
8	Badan Penghubung Daerah	9	15	Rp -	Rp -	Rp -	9	15	7
9	Biro Administrasi Pembangunan & Kerjasama	8	13	Rp 3.164.798,00	Rp 3.164.798,00	Rp -	8	13	12
TOTAL		77	120	Rp 7.706.798,00	Rp 7.706.798,00	Rp -	77	120	93

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

NO	SKPD / BIRO	TEMUAN							
		Temuan Keuangan					Temuan Administrasi		
		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai Temuan	Telaah Disetor	Belum Disetor	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Sudah Selesai TL Ditindaklanjuti (BT)
1	Sekretariat DPRD	3	4	Rp -	Rp -	Rp -	3	4	0
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7	11	Rp -	Rp -	Rp -	7	11	0
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	16	Rp -	Rp -	Rp -	6	16	0
4	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil	10	16	Rp -	Rp -	Rp -	10	16	0
5	Dinas Perkebunan	4	4	Rp -	Rp -	Rp -	4	4	4
6	Rumah Sakit Jiwa Daerah	5	9	Rp -	Rp -	Rp -	5	9	5
7	Dinas Perhubungan	5	5	Rp -	Rp -	Rp -	5	5	0
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	12	Rp 3.040.000,00	Rp -	Rp 3.040.000,00	7	12	10
9	Dinas Lingkungan Hidup	7	9	Rp 12.950.000,00	Rp 12.950.000,00	Rp -	7	9	9
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	26	Rp 27.420.000,00	Rp 4.900.000,00	Rp 22.520.000,00	17	26	20
TOTAL		71	112	43.410.000,00	17.850.000,00	25.560.000,00	71	112	48

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi s.d Desember 2019, adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi = $(141 : 232) \times 100\% = 60,77\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja 2019: $(\text{Realisasi Kinerja 2019} : \text{Target Kinerja 2019}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(60,77\% : 94\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 64,64%

Tabel 3.2.18
Capaian Kinerja atas
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi

Indikator Kinerja	2020			2019		
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	94%	32,50%	34,57%	94%	60,77%	64,64%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2019

Sasaran V : MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat Tahun 2020 dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2020
Adapun jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2020 adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang.
- 2) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2019
Adapun jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2019 adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.
- 3) Hitung persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2020, dengan formula :

Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2020 = $((\text{Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2020} - \text{jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2019}) : \text{Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2019}) \times 100\%$

Maka,

Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2020
 $= ((59 - 45) : 45) \times 100\% = 31,11\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(131\% : 86\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 152%

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat Tahun 2019 dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2019

Adapun jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2019 adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) orang

- 2) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2018

Adapun jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2018 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang

- 3) Hitung persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2019, dengan formula :

Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2019 = $((\text{Jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2019} - \text{jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2018}) : \text{Jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2018}) \times 100\%$

Maka,

Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2019

$= ((45 - 43) : 45) \times 100\% = 4,4\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(86\% : 86\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 100%

Tabel 3.2.19
Capaian Kinerja atas
Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat

Indikator Kinerja	2020			2019		
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	86%	131%	152%	86%	86%	100%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2019

Sasaran VI : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja atas Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020, diperoleh dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target kinerja tahun 2020, adapun capaian kinerja atas IKM tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.20
Capaian Kinerja IKM Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1	2	3	4
Skor IKM	79,92	82,08	102%

2. Indikator Kinerja : Nilai AKIP

Capaian Kinerja atas Jumlah Nilai AKIP tahun 2020 menggunakan data hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi atas LKj Tahun 2019, dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses evaluasi AKIP. Adapun capaian kinerja atas jumlah nilai AKIP tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.21
Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1	2	3	4
Jumlah Nilai AKIP	62	80,12	129%

3. Indikator Kinerja : Laporan Keuangan sesuai SAP

Capaian Kinerja atas Laporan Keuangan sesuai SAP tahun 2020 dihitung berdasarkan perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas Laporan Keuangan sesuai SAP tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.22
Capaian Kinerja Laporan Keuangan sesuai SAP Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1	2	3	4
Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%

3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA 2021	TARGET KINERJA 2021 (Renstra)	CAPAIAN KINERJA 2021	Ket
1	2	3		4	5	6 = (4:5) * 100%	6
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	100%	100%	Tercapai



		2	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	98%	64,31%	65,61%	Tidak Tercapai
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.	1	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	70%	93%	132%	Tercapai
		2	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	45%	81,82%	181,82%	Tercapai
III	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	64%	82%	128%	Tercapai
IV	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1	Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan	92%	62,89%	68,35%	Tidak Tercapai
		2	Persentase rekomendasi Itjend yang dapat diselesaikan	100%	84,06%	84,06%	Tidak Tercapai
		3	Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan	96%	46,21%	48,14%	Tidak Tercapai
V	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	86%	164%	190%	Tercapai
VI	Meningkatnya Kuailtas Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,92	83,47	104,44%	Tercapai
		2	Nilai AKIP	62	80,51	129,85%	Tercapai
		3	Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	Tercapai

3.4 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran I : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

1. Indikator Kinerja : Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP

Realisasi atas Indikator kinerja **Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP** adalah sebesar 100%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 100%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Keuangan di 43 OPD.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD secara intens
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan di 43 (empat puluh tiga) OPD sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)

2. Indikator Kinerja : Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi

Realisasi atas Indikator kinerja **Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi** adalah sebesar 64,31%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 98%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.

- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

Sasaran II : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

1. Indikator Kinerja : Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B

Realisasi atas Indikator kinerja **Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B** adalah sebesar 93%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 70%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan SAKIP di 43 (empat puluh tiga) OPD.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD secara intens.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SAKIP di 43 (empat puluh tiga) OPD sesuai dengan Permenpan Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP.

2. Indikator Kinerja : Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai “B”

Realisasi atas Indikator kinerja **Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai “B”** adalah sebesar 81,82%, telah mencapai target yang diinginkan sebesar 45%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan SAKIP di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan Biro Organisasi Setda Kabupaten/Kota secara intens
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SAKIP di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi melalui Biro Organisasi Setda di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Sasaran III : MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH KAB/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Indikator Kinerja : Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”.

Realisasi atas Indikator kinerja **Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”** adalah sebesar 82%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 64%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Biro Pemerintahan Otda Setda Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi secara intens.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Dokumen LPPD di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi

melalui Biro Pemerintah Otda Setda di masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Sasaran IV : MENINGKATNYA PENYELESAIAN TLHP APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL

1. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Realisasi atas Indikator kinerja **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK** adalah sebesar 62,89%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 92%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

2. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

Realisasi atas Indikator kinerja **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri** adalah sebesar 84,06%,

belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

3. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi

Realisasi atas Indikator kinerja **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi** adalah sebesar 46,21%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 96%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

Sasaran V : MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat adalah sebesar 164%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 86%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP dan Kemendagri secara intens terhadap jadwal pendidikan dan pelatihan APIP selama masa pandemi covid-19.

- 2) Melaksanakan rapat koordinasi dengan BKN Regional IV dan BKD Provinsi Jambi dalam pengangkatan Inpassing Auditor dan P2UPD di lingkup Inspektorat Provinsi Jambi.
- 3) Menyediakan Fasilitas Pembelajaran dengan Sistem Daring dan Luring untuk pemeriksa APIP Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Sasaran VI : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi atas Indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat** adalah sebesar 83,47 telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 79,92. Hal tersebut karena salah satu Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai *Providing Service For A Good Governace*.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan pengaduan dengan media telepon, internet, surat kabar, foto
- 2) Memberikan pelatihan dan asistensi sesuai dengan kebutuhan kegiatan dimasing-masing OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- 3) Menerima konsultasi masyarakat di bidang pengawasan.

2. Indikator Kinerja : Nilai AKIP

Realisasi atas Indikator kinerja **Nilai AKIP** adalah sebesar 80,51 telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 62 Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan AKIP Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi secara intens.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan AKIP Provinsi Jambi kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

3. Indikator Kinerja : Laporan Keuangan sesuai SAP

Realisasi atas Indikator kinerja **Laporan Keuangan sesuai SAP** adalah sebesar 100%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 100%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi secara intens.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Pengelolaan BMD Setda Provinsi Jambi secara intens.
- 3) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2021	Serapan Anggaran (%)	Ket
1	2	3		4	5	6
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	95,88%	Tidak Efisien
		2	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	65,61%		
			Rata-rata Capaian	82,80%		



II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.	1	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	132%	91,93%	Efisien
		2	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	181,82%		
			Rata-rata Capaian	156,91%		
III	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	128%	95,88%	Efisien
IV	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1	Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan	68,35%	95,88%	Tidak Efisien
		2	Persentase rekomendasi Itjend yang dapat diselesaikan	84,06%		
		3	Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan	48,14%		
			Rata-rata Capaian	66,85%		
V	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	190%	95,64%	Efisien
VI	Meningkatnya Kuailtas Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104,44%	95,86%	Efisien
		2	Nilai AKIP	129,85%		
		3	Laporan Keuangan sesuai SAP	100%		
			Rata-rata Capaian	111,43%		



3.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1 Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	100%	Tercapai	- Penyelenggaraan Pengawasan - Pendampingan dan Asistensi	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu - Pendampingan dan Asistensi
		2 Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dike mbalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	98%	64,31%	Tidak Tercapai	- Penyelenggaraan Pengawasan - Pendampingan dan Asistensi	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu - Pendampingan da Asistensi
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.	1 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	70%	93%	Tercapai	Penyelenggaraan Pengawasan	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
		2 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	45%	81,82%	Tercapai	Penyelenggaraan Pengawasan	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
III	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1 Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	64%	82%	Tercapai	Penyelenggaraan Pengawasan	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
IV	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1 Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan	92%	62,89%	Tidak Tercapai	Penyelenggaraan Pengawasan	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		2 Persentase rekomendasi Itjend yang dapat diselesaikan	100%	84,06%	Tidak Tercapai		
		3 Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan	96%	46,21%	Tidak Tercapai		



V	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	86%	164%	Tercapai	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
VI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,92	83,47	Tercapai	Penyelenggaraan Pengawasan	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		2	Nilai AKIP					- Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
		3	Laporan Keuangan sesuai SAP	62	80,51	Tercapai		
				100%	100%	Tercapai		

3.7 Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 meliputi Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa APBD Murni dari anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. Rp36.227.791.781,- dan APBD Perubahan dari anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp29.174.283.754,- dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 realisasinya sebesar Rp26.754.393.442 atau 91,71% dari anggaran. Adapun rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2021

URAIAN/ PROGRAM		KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI	
				(Rp)	%
Belanja			29.174.283.754	26.754.393.442	91,71
Belanja Tidak Langsung			14.686.888.811	13.921.660.121	94,78
Belanja Langsung			14.487.394.943	12.832.733.321	91,58
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.399.212	188.376.012	74,93
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.280.328.811	13.610.560.121	95,31
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.695.978.860	1.622.021.059	95,64
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.884.082.289	1.811.802.800	96,16



URAIAN/ PROGRAM		KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI	
				(Rp)	%
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.745.482.289	1.476.635.903	84,60
		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.126.194	594.574.602	78,12
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.051.732.745	950.772.030	90,40
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.960.610.202	4.756.460.220	95,88
		2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	822.622.572	756.251.800	91,93
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	276.691.760	158.814.920	57,40
		2 Pendampingan dan Asistensi	1.444.228.820	830.448.975	57,50

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

BAB 4

Penutup

A. TINJAUAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja umumnya pelaksanaan kegiatan dan program dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dikategorikan dalam *kategori Baik*.

B. TINJAUAN KHUSUS

Pada Tahun Anggaran 2021, terhadap hasil penilaian akuntabilitas Provinsi Jambi belum mampu mencapai akuntabilitas kinerja dalam kategori **baik**. Untuk itu sangat diperlukan beberapa upaya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pada beberapa kegiatan, khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, yang berupa: temuan kerugian daerah, temuan BPK RI, temuan Irjend Kemendagri, temuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

C. SARAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya pencapaian kinerja yang maksimal dan meminimalisasi *deviasi* nilai capaian kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis yakni Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional yang belum optimal dalam mencapai outcome nya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permenpan Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional bahwa “ Pelaksanaan TLHP BPK adalah tanggung jawab Pimpinan Instansi Pemerintah sedangkan Pelaksanaan TLHP APIP pada Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dilakukan oleh Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP-APIP”. Oleh sebab itu, diperlukan *sistem reward dan punishment* kepala OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut yang menjadi tanggungjawabnya yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tindak Lanjut (SPKM-TL) yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala OPD dengan Kepala Daerah/Gubernur dalam penyelesaian tindak lanjut.
2. Tugas dan Fungsi penyelesaian tindak lanjut merupakan salah satu fungsi Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, dengan jumlah personil sumber daya manusia (SDM) sebanyak 7 orang, sehingga target penyelesaian tindak lanjut tidak optimal. Untuk itu diperlukan strategi untuk melibatkan Fungsi Pembinaan Pengawasan (consulting) dari Fungsional Pengawas (Auditor dan P2UPD) yang jumlah SDM nya telah maksimal sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang.

Jambi, Februari 2022

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP.19690818 199703 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H, AGUS HERIANTO, SH
Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.H. AL HARIS, S.Sos., M.H.
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Februari 2022

Pihak Kedua
GUBERNUR JAMBI,

DTO

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

Pihak Pertama
INSPEKTUR,

DTO

H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690818 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	- Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti - Tingkat Maturitas SPIP - Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam Pengelolaan Keuangan dan Aset. - Persentase Kategori hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal "B"	90 % Level 3 60 % 95 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	- Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi - Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah - Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi.	Level 3 3 15 %

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 25.768.206.063	APBD
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 7.053.214.837	APBD
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 3.178.579.100	APBD
JUMLAH	Rp. 36.000.000.000	

Jambi, Februari 2022

Pihak Kedua
GUBERNUR JAMBI,

Pihak Pertama
INSPEKTUR,

DTO

DTO

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690818 199703 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERDIANSYAH, S. STP, MA

Jabatan : Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr.H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

GUBERNUR JAMBI,

Dr.H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Jambi, Januari 2021

Pihak Pertama,

Plt. INSPEKTUR,

FERDIANSYAH, S. STP, MA

Pembina

NIP. 19800701 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1. Persentase laporan keuangan SKPD sesuai SAP 2. Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Penilaian BPK RI atas LKPD Pemprov. Jambi	100 % 98 %
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B " 2. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	70 % 45 %
3. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1. Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	64 %
4. Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1. Persentase Tindak Lanjut Sesuai : - BPK - Itjend Kemendagri - Inspektorat Provinsi	92 % 100 % 96 %
5. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	86 %
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai AKIP 3. Laporan Keuangan sesuai SAP	79,92 62 100

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 25.606.379.297	APBD
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 7.631.723.465	APBD
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.994.789.020	APBD
JUMLAH	Rp. 36.232.891.782	


Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Jambi, Januari 2021
Pt. INSPEKTUR,

FERDIANSYAH, S. STP, MA
 Pembina
 NIP. 19800701198912110001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Kerja : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. Tugas :
Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

3. Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	IKU	Sumber Data
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	- Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti - Tingkat Maturitas SPIP - Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset - Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B"	Obrik/SKPD/Kabupaten/Kota/ Ikhtisar LHP
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	- Tingkat Kapabilitas APIP. - Indeks kepuasan auditi atas kinerja	LHE LKj, LHA, DUK, Peta Kompetensi, Survei Eksternal.

		pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah 3. Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	
--	--	--	--

Jambi,

Januari 2022

Pt. INSPEKTUR,



FERDIANSYAH, S.STP.,MA

Pembina

NIP. 19800701 199912 1 001

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi			5	2	20	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)			9.6 M		12.4 M		14.5 M		17.5 M		19.5 M		73.5 M	ITPROV	PROV. JAMBI	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	5	2	20	1	- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	75%	85%	5.2 M	100%	6.3 M	100%	7.5 M	100%	8.3 M	100%	9.1 M	100%	37 M		
		Persentase nilai temuan keuangan daerah yang ditindaklanjuti sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi						Persentase nilai temuan keuangan daerah yang ditindaklanjuti sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	71%	75%		82%		88%		92%		98%		98%			
		Persentase peningkatan penilaian SKPD yang berpredikat " Tertib "						Persentase peningkatan penilaian SKPD yang berpredikat " Tertib "	69%	71%		73%		76%		78%		80%		80%			
	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik		5	2	20	2	- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat penyelesaian kasus dan klarifikasi Kasus	37%	60%	376 jt	65%	451 jt	80%	541 jt	85%	649 jt	87%	779 jt	87%	2.8 M		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	5	2	20	3	- Kegiatan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	59%	61%	2.9 M	63%	3.4 M	65%	4.1 M	67%	5 M	70%	6 M	70%	22 M		
		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "						Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	0%	9%		18%		27%		36%		45%		45%			
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"						Persentase hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	18%	27%		36%		45%		55%		64%		64%			
	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional		5	2	20	5	- Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah buku katalog dan laporan hasil pemeriksaan	25 buku	25 buku	58 jt	25 buku	69 jt	25 buku katalog	83 jt	25 buku katalog	100 jt	25 buku katalog	120 jt	125 buku katalog	430 jt		
		Persentase tindak lanjut BPK yang selesai	5	2	20	6	- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase tindak lanjut BPK yang selesai	82%	83%	1.5 M	85%	1.6 M	87%	1.7 M	90%	1.8 M	92%	1.9 M	92%	7.5 M		
		Persentase tindak lanjut Itjend Kemendagri yang selesai						Persentase tindak lanjut Itjend Kemendagri yang selesai	63%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase tindak lanjut Inspektorat Provinsi yang selesai						Persentase tindak lanjut Inspektorat Provinsi yang selesai	35%	88%		90%		92%		94%		96%		96%			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
	Terbangunnya sinergi dan kesepahaman baik dengan SKPD maupun dengan sesama Aparat Pengawas Fungsional lainnya dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemeriksaan, dan membahas isu-isu pengawasan yang relevan	Jumlah Pelaksanaan Gelarwasda	5	2	20	7	- Kegiatan Gelar Pengawasan dan Rapat Koordinasi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Gelarwasda	9 kali	2 Kali	909 jt	2 Kali	1.1 M	2 Kali	1.2 M	2 Kali	1.3 M	2 Kali	1.35 M	10 kali	6 M		
		Jumlah Pelaksanaan Rakerwasda						Jumlah Pelaksanaan Rakerwasda	17 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		20 kali			
		Persentase Koordinasi Pengawasan dengan Itjend Terkait	5	2	20	11	- Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Persentase Koordinasi Pengawasan dengan Itjend Terkait	-	100%	772 jt	100%	849 jt	100%	934 jt	100%	1.1 M	100%	1.2 M	100%	4.9 M		
Tersedianya Aparatur Pengawasan yang Profesional serta tertatanya kelembagaan Inspektorat sebagai penjamin mutu (Quality assurance) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.			5	2	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase peningkatan jumlah pemeriksa yang telah lulus mengikuti diklat sertifikasi	35%	45%	1.1 M	55%	1.2 M	65%	1.3 M	75%	1.4 M	90%	1.6 M	100%	6.6 M	ITPROV	PROV. JAMBI
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	5	2	21	1	- Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	35%	44%	752 jt	70%	827 jt	80%	901 jt	86%	980 jt	90%	1.1 M	100%	4.5 M		
			5	2	21	2	- Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Persentase peningkatan jumlah APIP yang telah mengikuti diklat terkait bidang pengawasan	30%	45%	351 jt	55%	386 jt	65%	424 jt	75%	467 jt	90%	513 jt	90%	2.1 M		
			5	2	22		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	Persentase Tertatanya Kelembagaan, Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan Inspektorat Prov. Jambi	75%	80%	679 jt	83%	814 jt	85%	977 jt	87%	1.1 M	90%	1.4 M	90%	4.9 M	ITPROV	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Tersusunnya peraturan/keputusan di Bidang Pengawasan dan tersusunnya laporan kegiatan Inspektorat.	Jumlah Peraturan Bidang Pengawasan	5	2	22	2	- Kegiatan Penyusunan dan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Peraturan Bidang Pengawasan	Terbitnya 3 SK Gubernur, 4 SK Sekda dan 9 SK Inspektur Bid. Pengawasan	Terbitnya 1 SK Gubernur, dan 4 SK Inspektur Bid. Pengawasan	679 jt	814 jt	977 jt	1.1 M	1.4 M	Terbitnya 5 SK Gubernur, dan 30 SK Inspektur Bid. Pengawasan	4.9 M				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas pelayanan administrasi perkantoran menjadi lebih efisien	5	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	20%		2.1 M	2.7 M	3.2 M	4 M	5.1 M	16.7 M	ITPROV	PROV. JAMBI			
			5	2	1	1	- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar per tahun (lembar)	480 Surat	480 Surat	6.6 jt	520 Surat	7.9 jt	520 Surat	9.5 jt	550 Surat	13.7 jt	2620 Surat	49.1 jt		
			5	2	1	2	- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	183 jt	12 Bulan	219 jt	12 Bulan	263 jt	12 Bulan	316 jt	12 bulan	1.3 M		
			5	2	1	3	- Kegiatan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Set)	12 set	12 set	3 jt	12 set	4,3 jt	12 set	5,2 jt	12 set	6,2 jt	12 set	7,5 jt	60 set	26.2 jt
			5	2	1	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Periode Pembayaran Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Tahun)	-	1 Tahun	85 jt	1 Tahun	102 jt	1 Tahun	122 jt	1 Tahun	146 jt	1 Tahun	176 jt	1 Tahun	631 jt
			5	2	1	6	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan diperpanjang izinnya (unit)	17 unit	17 unit	387 jt	17 unit	465 jt	20 unit	558 jt	20 unit	803 jt	20 unit	2.8 M		
			5	2	1	7	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan (ob)	531 ob	531 ob	132 jt	531 ob	158 jt	625 ob	190 jt	625 ob	228 jt	735 ob	273 jt	3047 ob	981 jt

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			5	2	1	8	- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor (bulan)	12 bln	12 bln	25,7 jt	12 bln	30,9 jt	12 bln	37 jt	12 bln	44 jt	12 bln	53 jt	12 bln	190 jt		
			5	2	1	9	- Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	108 unit	-	-	108 unit	147,7 jt	125 unit	176,4 jt	130 unit	211 jt	135 unit	253 jt	135 unit	788 jt		
			5	2	1	10	- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK (set)	30 set	30 set	102,4 jt	45 set	122,4 jt	50 set	146,8 jt	55 set	176 jt	60 set	211 jt	240 set	760 jt		
			5	2	1	11	- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	14 set	14 set	60,6 jt	19 set	72,7 jt	24 set	87,2 jt	29 set	104 jt	34 set	124 jt	120 set	450 jt		
			5	2	1	12	- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)	15 buah	15 buah	51,8 jt	20 buah	62 jt	25 buah	74,5 jt	30 buah	89,5 jt	35 buah	107 jt	125 buah	386 jt		
			5	2	1	15	- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundang-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	325 eks	325 eks	39,7 jt	325 eks	47,7 jt	325 eks	57,2 jt	325 eks	48.6 jt	325 eks	49.2 jt	1625 eks	243 jt		
			5	2	1	17	- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang)	950 orang	1030 orang	120 jt	1045 orang	144 jt	1085 orang	172 jt	1102 orang	207 jt	1120 orang	248 jt	5382 orang	891 jt		
			5	2	1	18	- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (OH)	1050 oh	1150 oh	1.0 M	1250 oh	1.2 M	1350 oh	1.4 M	1450 oh	1.7 M	1550 oh	2.0 M	6750 oh	7.3 M		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		5	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	75%	2.2 M	90%	1.7 M	95%	2.7 M	95%	2.5 M	95%	2.3 M		11.4 M	ITPROV	PROV. JAMBI
			5	2	2	5 - Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)	3 unit	-	-	-	-	2 unit	950 jt	10 unit	180 jt	-	-	12 unit	1.1 M		
			5	2	2	7 - Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	3 Jenis	200 jt	5 Jenis	240 jt	7 Jenis	288 jt	9 Jenis	345 jt	12 Jenis	414 jt	36 Jenis	1.4 M		
			5	2	2	9 - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan Peralatan gedung kantor	7 Jenis	9 Jenis	337 jt	12 Jenis	404 jt	13 Jenis	485 jt	14 Jenis	582 jt	15 Jenis	650 jt	63 Jenis	2.4 jt		
			5	2	2	10 - Kegiatan pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	40 unit	95 unit	144 jt	98 unit	172 jt	65 unit	150 jt	45 unit	165 jt	55 unit	175 jt	358 unit	806 jt		
			5	2	2	11 - Kegiatan Pengadaan komputer	Jumlah Pengadaan Komputer	10 unit	24 unit	611 jt	10 unit	150 jt	5 unit	120 jt	12 unit	180 jt	8 unit	145 jt	59 unit	1.2 M		
			5	2	2	22 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	1 Gedung	310 jt	1 Gedung	372 jt	1 Gedung	535 jt	1 Gedung	642 jt	1 Gedung	680 jt	1 Gedung	2.5 M		
			5	2	2	28 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	127 unit	127 unit	152 jt	155 unit	182 jt	160 unit	218 jt	165 unit	262 jt	170 unit	315 jt	170 unit	1.1 M		
			5	2	2	42 - Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	1 Gedung	1 Gedung	541 jt	1 Gedung	250 jt	-	-	1 Gedung	200 jt	-	-	1 Gedung	991 jt		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Tersedianya Pakaian Pegawai	Persentase pengadaan pakaian dengan jumlah dana	5	2	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	48 jt	100%	54 jt	100%	60 jt	100%	66 jt	100%	72 jt	100%	300 jt	ITPROV	PROV. JAMBI
			5	2	3	2 - Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapa	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	105 stel	120 stel	48 jt	120 stel	54 jt	120 stel	60 jt	120 stel	66 jt	120 stel	72 jt	600 stel	300 jt		
	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Persentase jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	100 %	100 %	63.1 jt	100 %	75.7 jt	100 %	90.9 jt	100 %	109 jt	100 %	130 jt	100 %	468.7 jt	ITPROV	
		Persentase jumlah laporan kinerja yang disusun				- Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase jumlah laporan kinerja yang disusun	100 %	100 %	63.1 jt	100 %	75.7 jt	100 %	90.9 jt	100 %	109 jt	100 %	130 jt	100 %	468.7 jt		

[illegible]

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												Ket.				
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4						TR 1				TR 2				TR 3					TR 4			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3				4	5	6	7	8	9												10				
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat	-	-	-	86%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	Rp3.499.984.632	PPTK Subbag Umum, Administrasi dan Keuangan																	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	Rp1.136.612.800	PPTK Subbag Umum, Administrasi dan Keuangan																	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, kinerja dan keuangan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	-	72,92	Program Penyelenggaraan Pengawasan																					
	Nilai AKIP	-	-	-	62	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	100%	Rp6.524.402.093	PPTK Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan																	
	Pelaporan Keuangan sesuai SAP	-	-	-	100%	Kegiatan Penyelenggraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	Rp1.107.321.372	PPTK Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan																	

Jambi,

Januari 2021

PIT. INSPEKTUR,



INSPEKTORAT DAERAH

FERDIANSYAH, S.STP.,MA

Pembina

NIP. 19800701 199912 1 001

PEMERINTAH DAERAH

JAMBI



**DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Hasil Quality Assurance memberikan penghargaan kepada :

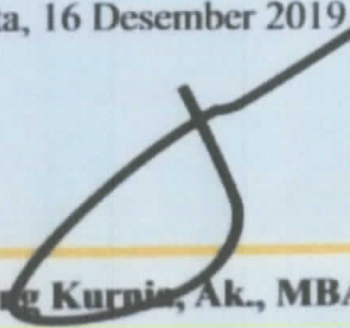
Pemerintah Provinsi Jambi

atas prestasinya dalam pencapaian

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP LEVEL 3

*dalam skala 0-5

Jakarta, 16 Desember 2019



Dadang Kurnia, Ak., MBA, CA, CGAP, QIA, CFrA, ASEAN CPA



**DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Hasil *Quality Assurance* memberikan penghargaan kepada :

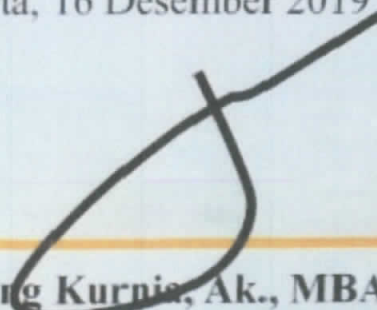
Inspektorat Provinsi jambi

atas prestasinya dalam pencapaian

KAPABILITAS APIP LEVEL 3

*dalam skala 1-5

Jakarta, 16 Desember 2019


Dadang Kurnia, Ak., MBA, CA, CGAP, QIA, CFrA, ASEAN CPA